



**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR
DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA DENGAN TINGKAT
PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DI KECAMATAN
KETANGGUNGAN KABUPATEN
BREBES**



MELVINA ANGGIKA TAMA
NIM. 4321034

2025

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI DI KECAMATAN
KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

MELVINA ANGGIKA TAMA

NIM. 4321034

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI DI KECAMATAN
KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

MELVINA ANGGIKA TAMA

NIM. 4321034

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melvina Anggika Tama

NIM : 4321034

Judul Skripsi : *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Mei 2025

Yang menyatakan,



Melvina Anggika Tama
NIM. 4321034

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Melvina Anggika Tama

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Melvina Anggika Tama

NIM : 4321114

Judul Skripsi : ***Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes***

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 15 Mei 2025

Pembimbing,



Ade Gunawan, M.M

NIP. 198104252015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan

www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **Melvina Anggika Tama**
NIM : **4321034**
Judul : **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes**

Dosen : **Ade Gunawan, M.M**
Pembimbing

Telah diujikan pada hari Selasa, 27 Mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Dr. Kuat Ismanto, M.Ag
NIP. 197912052009121001

Pratomo Cahyo Karniawan, M.Ak
NIP. 199105042020122012

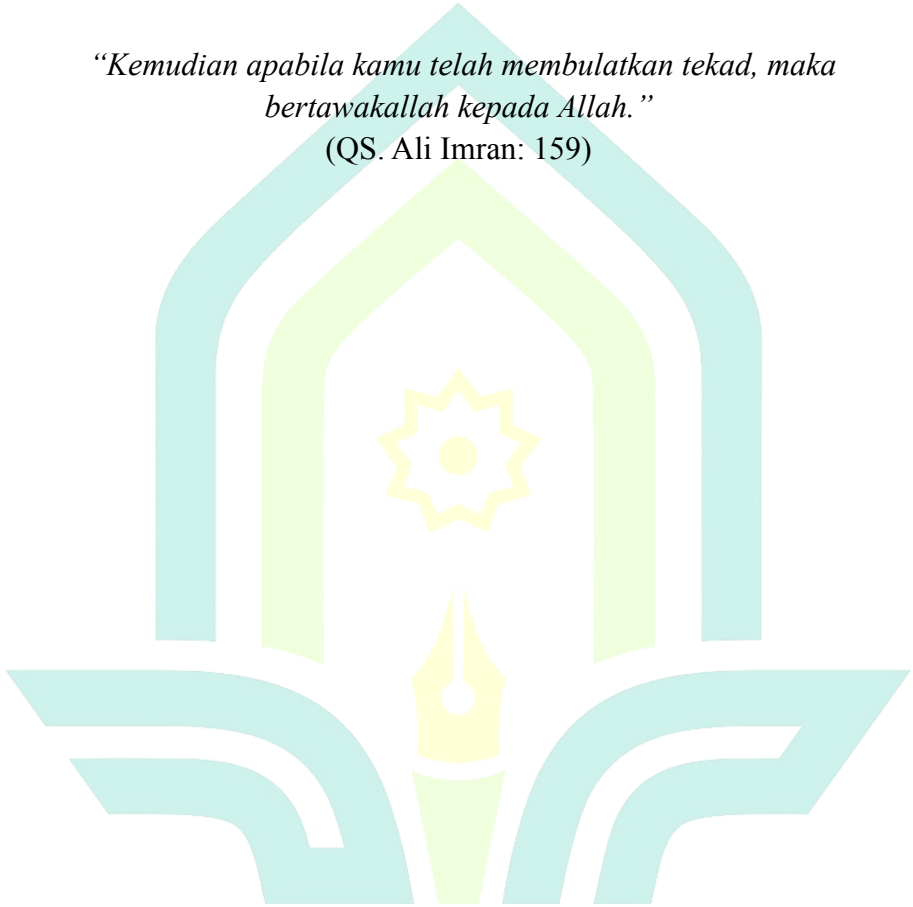
Pekalongan, 27 Mei 2025
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. H. AM. Muh. Khatidz Ma'shum, M.Ag
NIP. 197806162003121003

MOTTO

Skripsi ini bukan karya terbaik, tapi bukti bahwa saya tidak menyerah."

Skripsi ini ditulis dengan matcha, doa, dan deadline."
Melvina

"Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah."
(QS. Ali Imran: 159)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Mamah

Gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk kalian. Terima kasih atas cinta yang tak pernah usang oleh waktu, doa-doa kalian yang terucap lirih di sepertiga malam, kerja keras kalian yang tak pernah kalian keluhkan, semua itu menjadi energi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi. Tak ada kata yang cukup untuk membalas semua kasih sayang dan pengorbanan yang kalian berikan. Penulis berdiri di titik ini karena Allah mempercayakan saya lahir dari kalian sosok terhebat yang pernah kukenal. Semoga Allah membalas segala kebaikan Ayah dan Mamah dengan surga tertinggi. Kalian adalah alasan saya berdiri di titik ini.

2. Kakakku tersayang, Diki Lantama

Terima kasih telah menjadi tulang punggung yang kokoh. Atas segala jerih payahmu membiayai pendidikan ini dan dukungan yang tak pernah berhenti, serta selalu hadir sebagai penyemangat saat penulis hampir menyerah. Kakak dalah pahlawan dalam diam yang tak pernah meminta ucapan terima kasih, namun pantas mendapatkan segalanya. Skripsi ini adalah buah dari kerja kerasmu yang tak pernah engkau pamerkan, namun akan selalu penulis kenang. Dukunganmu, baik secara materil maupun moral, telah

menjadi pijakan kuat di setiap langkahku. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan dan balasan terbaik atas semua kebaikanmu.

3. Kakak ipar sekaligus sahabatku, Mba Selvi Fitriani
4. Terima kasih sudah menjadi sosok yang selalu ada di setiap masa naik-turun selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah banyak memberi semangat, dorongan, dan keyakinan saat penulis mulai merasa lelah dan ingin menyerah. Mba selalu tahu bagaimana cara menenangkan, menasihati tanpa menghakimi, dan menjadi tempat cerita terbaik ketika penulis sudah terlalu penat memendam semuanya sendiri. Semoga kebaikan dan ketulusan hati Mba selalu dibalas dengan kebahagiaan dan keberkahan yang berlipat-lipat.
5. Almamater tercinta-Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Terima kasih telah menjadi wadah ilmu, ruang tumbuh, dan tempat menempa nilai-nilai keislaman serta profesionalisme. Terima kasih telah menjadi rumah ilmu yang mempertemukan aku dengan gagasan-gagasan besar dan harapan-harapan masa depan. Semoga almamater ini terus melahirkan generasi cendekia yang berkualitas dan amanah.
7. Dosen pembimbing yang penulis hormati, Bapak Ade Gunawan, M.M
8. Terima kasih atas arahan, motivasi, dan kesabaran dalam membimbing setiap langkah penyusunan skripsi ini. Bimbingan Bapak bukan hanya membawa saya menyelesaikan tugas akhir, tetapi juga mengajarkan saya tentang makna kesungguhan, ketelitian, dan ketekunan. Semoga segala kebaikan Bapak dibalas dengan kebahagiaan yang lebih besar di masa depan.
9. Dosen Wali yang penulis hormati, Bapak Drajat Stiawan, M.Si
Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang selalu diberikan sepanjang perjalanan studi saya. Bimbingan Bapak menjadi penuntun yang berarti dalam proses akademik dan kehidupan

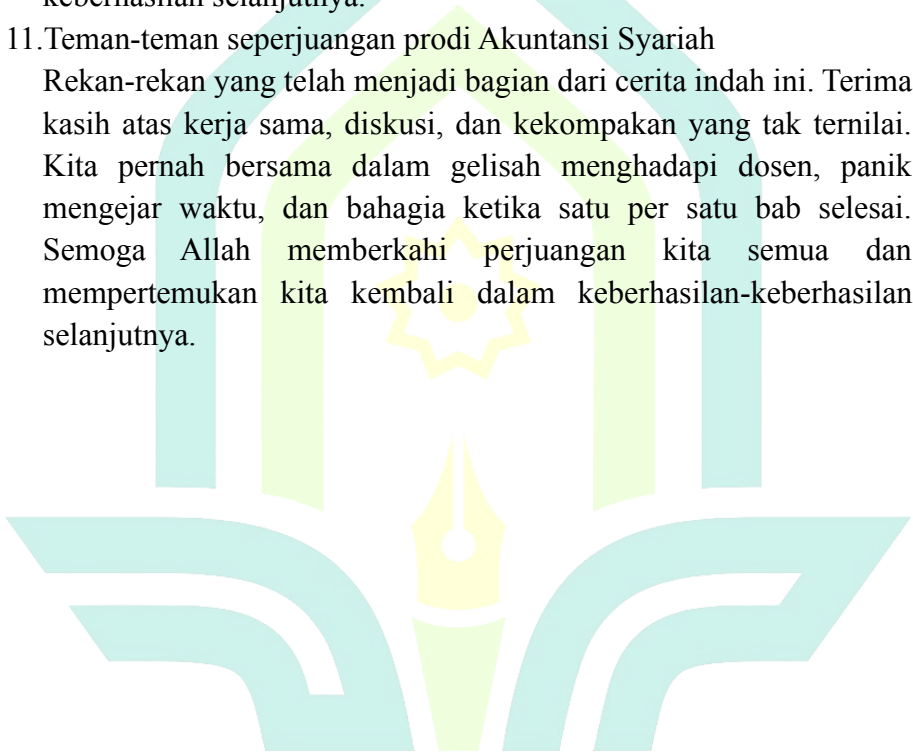
kampus saya. Semoga segala kebaikan Bapak dibalas dengan kebahagiaan yang lebih besar di masa depan.

10. Sahabat-sahabat tercinta

Arju, Nuris, Sukma, Safina, Anida, terima kasih telah kebersamai perjalanan ini dengan tawa, pelukan, dan semangat yang tak pernah padam. Kalian tahu kapan harus bercanda, kapan harus menguatkan, dan kapan harus diam sambil duduk menemani. Di antara tumpukan deadline dan revisi, kalian adalah tempat berbagi dan berpulang saat semangat mulai pudar. Semoga Allah memberkahi perjuangan kita semua dan mempertemukan kita kembali dalam keberhasilan-keberhasilan selanjutnya.

11. Teman-teman seperjuangan prodi Akuntansi Syariah

Rekan-rekan yang telah menjadi bagian dari cerita indah ini. Terima kasih atas kerja sama, diskusi, dan kekompakan yang tak ternilai. Kita pernah bersama dalam gelisah menghadapi dosen, panik mengejar waktu, dan bahagia ketika satu per satu bab selesai. Semoga Allah memberkahi perjuangan kita semua dan mempertemukan kita kembali dalam keberhasilan-keberhasilan selanjutnya.



ABSTRAK

MELVINA ANGGIKA TAMA. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuisioner secara langsung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa di OPD Kecamatan Ketanggungan yang berjumlah 63 orang.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis linear berganda untuk hipotesis 1, 2, dan 3. Untuk hipotesis 4, 5, dan 6 menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA).

Hasil penelitian dengan analisis linear berganda menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebaliknya, sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun analisis variabel moderating dengan Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa maupun sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian selanjutnya dengan Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Kompetensi Aparatur, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Tingkat Pendidikan, Akuntabilitas Dana Desa

ABSTRACT

MELVINA ANGGIKA TAMA. The Influence of Village Apparatus Competence, Utilization of Information Technology, Internal Control System on Accountability of Village Fund Management in Ketanggungan District, Brebes Regency.

This study aims to examine the influence of village apparatus competence, utilization of information technology, and internal control systems on the accountability of village fund management, with education level as a moderating variable in Ketanggungan District, Brebes Regency.

The data used in this study are primary data collected through a direct questionnaire survey. The sample consists of all village officials involved directly in the management of village funds within the regional apparatus organization (OPD) of Ketanggungan District, totaling 63 respondents.

Data analysis in this study employed multiple linear regression for testing hypotheses 1, 2, and 3. Meanwhile, hypotheses 4, 5, and 6 were tested using Moderated Regression Analysis (MRA).

The results of the multiple linear regression analysis indicate that village apparatus competence and the utilization of information technology have a significant effect on the accountability of village fund management. On the other hand, internal control systems do not significantly affect accountability. Furthermore, the moderating variable analysis using MRA shows that education level does not moderate the influence of village apparatus competence or internal control systems on accountability. However, the MRA results reveal that education level does moderate the effect of information technology utilization on the accountability of village fund management.

Keywords: Officials' Competence, Information Technology, Internal Control System, Education Level, Village Fund Accountability.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

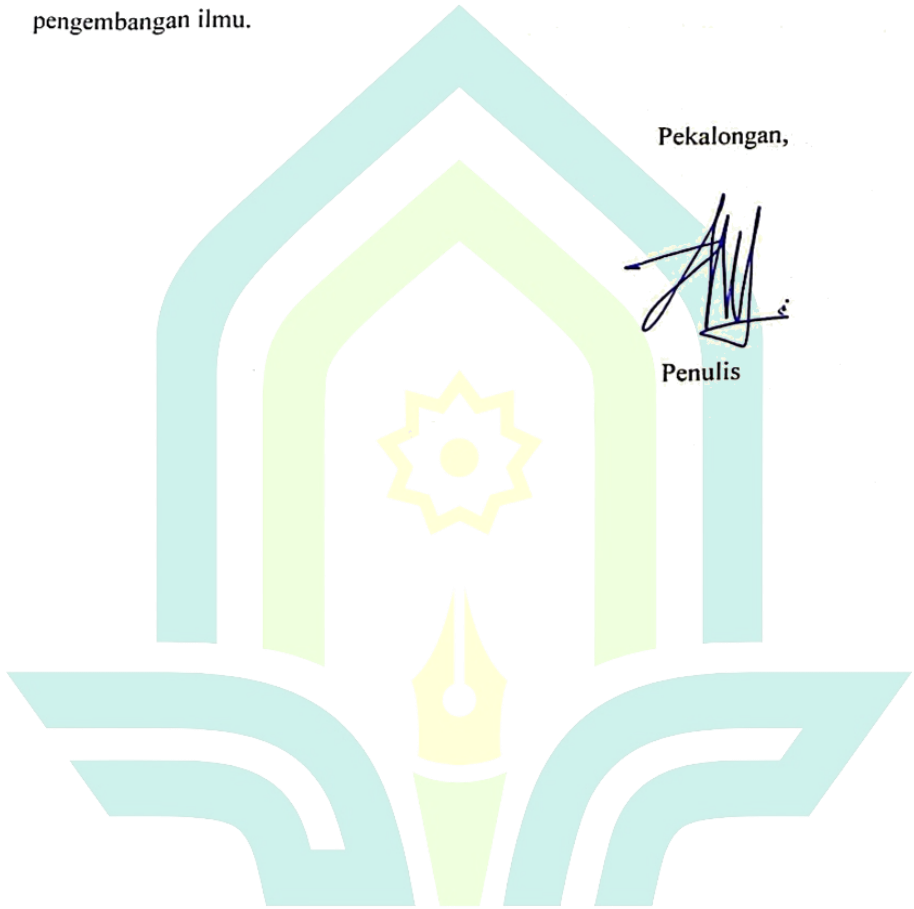
1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.ag. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drajat Stiawan, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
6. Bapak Dr. Kuat Ismanto, M.Ag. selaku dosen penguji 1.
7. Bapak Pratomo Cahyo, M.Ak. selaku dosen penguji 2.
8. Seluruh aparat desa se-Kecamatan Ketanggungan yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan.

9. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan,



Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 11
A. Teori Keagenan (Agency Theory)	11
B. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	12
C. Kompetensi Aparatur Desa	13
D. Pemanfaatan Teknologi Informasi	15
E. Sistem Pengendalian Internal.....	16

F. Tingkat Pendidikan.....	17
G. Telaah Pustaka.....	18
H. Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Populasi.....	37
C. Sampel.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Variabel Penelitian.....	39
F. Teknik Analisi Data	43
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	52
B. Deskripsi Data.....	53
C. Teknik Analisis Data.....	56
D. Uji Kualitas Data.....	61
E. Uji Asumsi Klasik.....	59
F. Hasil Uji Hipotesis.....	61
G. Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2. 1 Definisi Operasional Variabel.....	40
Tabel 3. 1 Kriteria Uji koefisien R (Square).....	50
Tabel 4. 1Tingkat Pengembalian Kuisisioner.....	53
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	54
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	54
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan.....	55
Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas.....	57
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas.....	58
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas	59
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas	60
Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	61
Tabel 4. 12 Hasil Uji Linear Berganda	62
Tabel 4. 13 Hasil Uji Statistik t	64
Tabel 4. 14 Hasil Uji MRA.....	65
Tabel 4. 15 Hasil Koefisien Determinasi	67

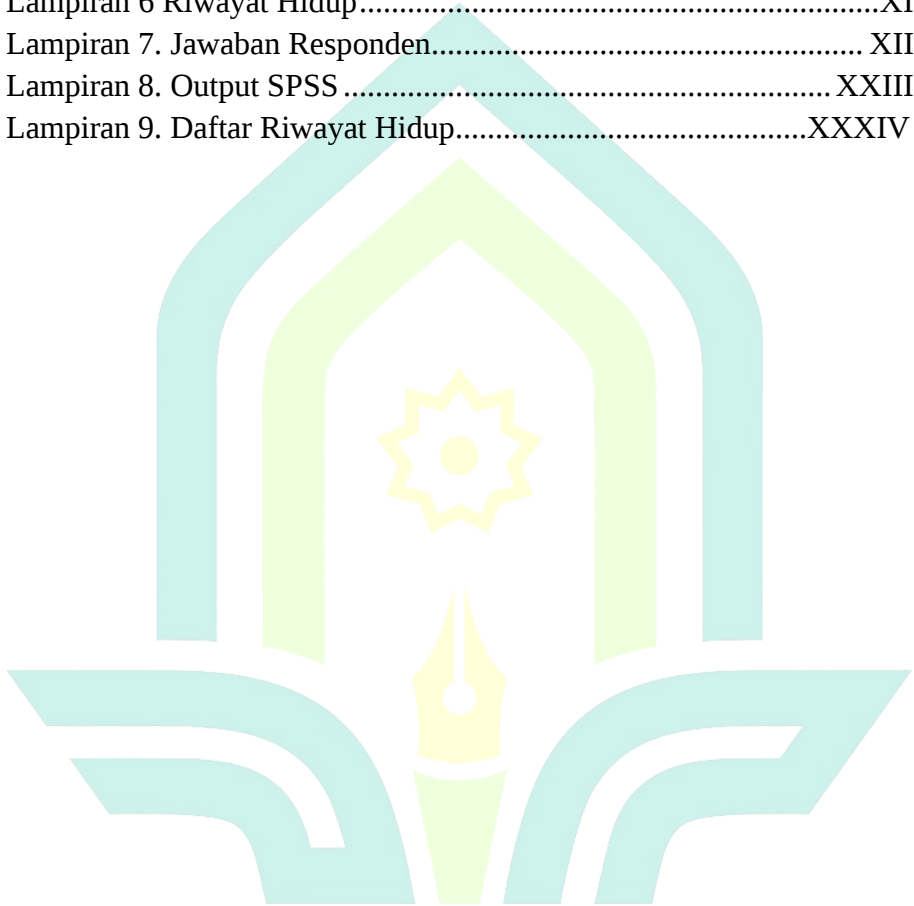
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir	29
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian	I
Lampiran 2 Surat Similarity Check	II
Lampiran 3 Kuisisioner	III
Lampiran 4 Dokumentasi.....	IV
Lampiran 5 Jawaban Responden.....	V
Lampiran 6 Riwayat Hidup.....	XI
Lampiran 7. Jawaban Responden.....	XII
Lampiran 8. Output SPSS	XXIII
Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup.....	XXXIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana Desa merupakan salah satu mekanisme penting yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memperlancar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), Dana tersebut dialokasikan kepada Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kabupaten/kota masing-masing. Pengelolaan Dana Desa ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dengan tujuan memberdayakan masyarakat Desa yang Bersumber dari APBN.

Sumber daya Desa dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang memastikan penggunaan yang tepat. Aparatur Desa bertanggung jawab atas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan alokasi dan pengeluaran dana. Tujuan utama pendanaan ini adalah untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Desa, memperbaiki pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi Desa, mengurangi ketidakmerataan pembangunan Desa, serta memperkuat peran masyarakat sebagai bagian penting dari proses pembangunan merupakan hasil-hasil pendanaan Desa yang diharapkan. Kualitas sumber daya manusia, akuntabilitas pelayanan publik, kesejahteraan, dan peningkatan pembangunan infrastruktur menjadi beberapa faktor penting dalam penyerapan dan realisasi pendapatan Desa (Izzy, 2019).

Akuntabilitas merupakan landasan dan komponen yang sangat penting agar setiap Aparatur Desa dapat menunjukkan rasa tanggungjawab dan keberhasilan dalam mengelola Dana Desa. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban individu atau organisasi untuk mengklarifikasi, membenarkan, dan melaporkan tindakan, keputusan, dan pemanfaatan sumber daya

mereka kepada para pemangku kepentingan. (Husain et al., 2023) mengatakan akuntabilitas adalah proses dimana individu atau entitas bertanggung jawab atas hasil yang mereka capai, khususnya yang berkaitan dengan pengeluaran dana publik.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah bentuk tanggung jawab institusi dalam melaporkan pencapaian atau kegagalan organisasi dalam menjalankan misinya serta meraih tujuan dan target yang telah ditentukan. Dalam pemerintahan, prinsip akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tujuan yang ingin dicapainya. Salah satu landasan pengelolaan pemerintahan adalah akuntabilitas, yang mempunyai dampak signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai inisiatif yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah demi kebaikan masyarakat (Ridwan et al., 2023). Laporan ini dibuat secara berkala dengan menitikberatkan pada parameter kinerja, yaitu pengukuran berdasarkan jumlah dan berdasarkan mutu yang mencirikan derajat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan menitikberatkan pada indikator *input, output, process, result, benefit*, dan *impact* (Febrianti & Yuhertiana, 2021).

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Fenomena yang terjadi di daerah ini menunjukkan adanya permasalahan terkait kompetensi Aparatur Desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal yang berdampak pada akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Beberapa desa di Kecamatan Ketanggungan masih menghadapi kendala dalam hal kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam memahami regulasi keuangan desa, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kurangnya pelatihan serta pendidikan yang memadai bagi perangkat desa menyebabkan berbagai kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan, hingga potensi penyalahgunaan

anggaran. Di sisi lain, penggunaan teknologi informasi di Kecamatan Ketanggungan juga belum dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh BPKP sebagai alat bantu dalam pencatatan keuangan desa. Namun, tidak semua desa di Kecamatan Ketanggungan mampu memanfaatkan sistem ini secara optimal. Beberapa perangkat desa masih bergantung pada pencatatan manual karena keterbatasan dalam penguasaan teknologi serta akses internet yang belum merata. Akibatnya, pencatatan transaksi keuangan desa menjadi kurang efisien, berisiko tinggi mengalami kesalahan, dan menghambat transparansi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, sistem pengendalian internal di Kecamatan Ketanggungan juga belum optimal. Seharusnya, pengelolaan keuangan desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), inspektorat daerah, serta masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa. Namun, pada praktiknya, masih banyak desa yang belum memiliki sistem pengendalian internal yang kuat. Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa masih kurang optimal, terlihat dari minimnya keterlibatan BPD dalam evaluasi anggaran, lemahnya mekanisme audit internal, serta kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek desa. Kondisi ini meningkatkan risiko penyelewengan dana dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Berhubungan dengan permasalahan akuntabilitas maka peneliti mencari berbagai faktor yang memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Faktor-faktor tersebut antarlain Kompetensi Aparatur Desa, Penggunaan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal. Penelitian sebelumnya telah mengkaji secara mendalam faktor-faktor ini, yang mengungkap perannya dalam memastikan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa. Penelitian (Nur et al., 2019) menyatakan jika akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa

Timur, secara signifikan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPIP). Ketiga faktor ini masing-masing mempunyai kontribusi paling efektif dan paling tidak efektif.

Faktor pertama yang memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah Kompetensi Aparatur Desa. Kompetensi merujuk pada karakteristik individu yang berhubungan dengan kinerja yang baik atau luar biasa dalam kondisi kerja tertentu. Kompetensi Aparatur Desa memainkan peran penting dalam kerangka pemerintahan Desa. Salah satu tanggung jawab utama struktur ini adalah pengelolaan keuangan pemerintah yang efektif, karena keberhasilan pembangunan Desa sangat bergantung pada kualitas pengelolaan keuangan. Aparatur Desa harus kompeten dalam mengelola Desanya dan menjamin tanggungjawab pengelolaan Dana Desa, khususnya melalui penggunaan mekanisme pengawasan internal, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan kompetensi Aparatur Desa. Kompetensi dipandang sebagai aspek mendasar karena sifat ini merupakan bagian yang menyatu dan inheren dalam kepribadian individu, sehingga mampu menjadi indikator untuk meramalkan berbagai kondisi dalam dunia kerja tertentu. Temuan (Mualifu & Guspul, 2019) menegaskan bahwa kompetensi Aparatur Desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Di sisi lain, temuan (Ridwan et al., 2023) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ialah penggunaan teknologi digital. Perangkat teknologi khususnya komputer, telah menyederhanakan proses bagi Aparatur Desa untuk mengelola berbagai data secara terpadu. Sebagai komponen integral dari sektor publik, Pemerintah Desa berkewajiban untuk memberikan layanan yang efektif kepada masyarakatnya sambil

memastikan pengelolaan Dana Desa yang bertanggung jawab. Untuk mencapai hal ini, Aparatur Desa perlu memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi operasional. Kemajuan teknologi yang pesat menawarkan peluang untuk perbaikan di berbagai bidang, yang menghasilkan kinerja yang lebih akurat dan lebih efisien sehingga berkontribusi pada peningkatan produktivitas kinerja instansi. Saat ini, pengelolaan Dana Desa seharusnya bisa lebih transparan dengan menggunakan teknologi, seperti aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Menurut (Nurkhasanah, 2019), penggunaan teknologi digital berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Penelitian (Riyadi & Kurniadi, 2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah Sistem Pengendalian Internal. Sejalan dengan Regulasi Pemerintah No. 5 tahun 2024 perihal Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), kerangka ini merupakan metode terpadu yang ditandai dengan tindakan dan kegiatan berkelanjutan untuk mengoptimalkan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa. SPIP melibatkan upaya yang sungguh-sungguh dari manajemen dan seluruh karyawan, bekerja sama untuk meraih tujuan organisasi. Tujuan ini dicapai melalui metode yang efisien dan efektif, seperti menyiapkan laporan keuangan yang kredibel, mengamankan kekayaan negara, serta menjamin ketaatan pada regulasi yang ada. Pengawasan yang baik sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan Dana Desa. Selaras dengan pandangan tersebut, penelitian (Meriana, 2022) mengungkapkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa. Sedangkan penelitian (Sutrepti et al., 2022) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pada penelitian ini, variabel moderasi seperti tingkat pendidikan memiliki peran penting, karena tingkat pendidikan dapat menjadi faktor penentu dalam memahami bagaimana kompetensi Aparatur Desa, penggunaan teknologi informasi dan pengendalian internal berpengaruh pada akuntabilitas penggunaan Dana Desa. Dalam penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa memerlukan pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal. Untuk mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, Aparatur Desa perlu memahami ilmu akuntansi atau ilmu ekonomi, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan. Menurut (Anjaliati et al., 2023) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas penyusunan laporan keuangan dana desa di beberapa desa di Kabupaten Dompu. Sedangkan penelitian (Sari, 2022) menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan Aparatur desa tidak menguatkan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini akan berfokus pada Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Studi ini bermaksud untuk memahami sejauh mana kompetensi Aparatur Desa, penggunaan teknologi informasi, dan penerapan sistem pengendalian internal dapat mengoptimalkan akuntabilitas penggunaan Dana Desa. Selanjutnya, penelitian ini mengkaji peran tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi, dengan fokus penelitian di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.

Meskipun banyak penelitian yang sudah mengkaji pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, penelitian yang secara khusus menelaah peran tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi masih terbatas. Melalui analisis terhadap berbagai faktor tersebut, peneliti berharap penelitian ini dapat menyajikan wawasan yang bermanfaat kepada pihak yang

memiliki kepentingan di Kecamatan Ketanggungan dan wilayah sekitarnya dalam meningkatkan sistem pengendalian internal mereka, yang pada gilirannya akan membantu mencapai tujuan organisasional dan memastikan penggunaan Dana publik yang efisien dan akuntabel.

Penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang aspek-aspek apa saja yang menyebabkan akuntabilitas penggunaan Dana Desa, dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan selaku mediator dalam prosesnya. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan akan menjadi landasan bagi perbaikan pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Ketanggungan dan untuk memajukan pengetahuan teoritis dan praktis di bidang pengendalian internal sektor publik.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti bisa menjabarkan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
4. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Tingkat Pendidikan sebagai variabel moderasi?
5. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Tingkat Pendidikan sebagai variabel moderasi?
6. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Tingkat Pendidikan sebagai variabel moderasi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk memahami apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
3. Untuk memahami apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
4. Untuk memahami apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan Tingkat Pendidikan selaku variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Tingkat Pendidikan sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan Tingkat Pendidikan selaku variabel moderasi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat teoritis :

1. Kajian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur pada sektor akuntansi sektor publik, terutama terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara kompetensi Aparatur Desa, teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pada akuntabilitas penggunaan Dana Desa.
2. Kajian ini menguji dan memperkuat relevansi teori akuntabilitas, teori agensi, serta teori pendidikan dalam konteks pengelolaan Dana publik di tingkat Desa. Variabel moderasi tingkat pendidikan memberikan perspektif baru terkait aspek yang memengaruhi pengaturan Dana Desa secara akuntabel.

3. Kajian ini berfungsi sebagai referensi berharga untuk penelitian mendatang tentang topik serupa, khususnya mengenai peran variabel moderasi dalam meningkatkan akuntabilitas di sektor publik.

Manfaat praktis :

1. Bagi Aparatur Desa, kajian ini diharapkan dapat membantu mereka memahami bagaimana mekanisme pengendalian internal, penggunaan teknologi informasi, dan kompetensi Aparatur Desa memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan sebagai faktor yang dapat memperkuat atau melemahkan ketiga faktor diatas.
2. Bagi lembaga pendidikan, kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi lembaga pendidikan dalam mengembangkan kurikulum yang relevan, terutama dalam bidang Akuntansi Sektor Publik.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, , tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori diuraikan mengenai kompetensi Aparatur Desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, tingkat pendidikan, tinjauan literatur, hipotesis, kerangka berpikir, serta uraian teoritis lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian dijelaskan mengenai jenis dan metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel

penelitian, sumber dan teknik pengambilan sampel, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum subjek penelitian, serta berbagai hasil pengumpulan data dan analisis data mengenai hasil penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran, keterbatasan penelitian, dan implikasi teoritis dan praktis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Teori ini membahas tentang hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal sebagai pemilik dan agen sebagai pengelola. Dalam hubungan ini, konflik kepentingan dapat muncul karena agen cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, yang belum tentu sejalan dengan kepentingan prinsipal. Jensen dan Meckling menekankan bahwa perbedaan tujuan antara kedua belah pihak dapat menimbulkan masalah dalam pengelolaan organisasi (Said et al., 2022).

Agency theory adalah konsep yang menggambarkan interaksi antara agen sebagai penerima kepercayaan dan prinsipal sebagai pihak yang memberikan kepercayaan. Agen adalah orang perseorangan atau badan yang bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal adalah orang yang memberi amanat kepada agen untuk melakukan tugas tertentu. Dalam konteks pemerintahan, masyarakat selaku prinsipal dipandang sebagai pihak utama dalam kerangka pemerintahan Desa yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah seperti Kepala Desa dan jajarannya, dalam melakukan tanggung jawab tertentu (rahmaindah, 2022).

Prinsipal mempunyai kewajiban untuk menuntut laporan pertanggungjawaban dari agen atas pelaksanaan tugas yang telah diberikan. Namun, teori keagenan menyadari bahwa standarnya memerlukan ekspektasi yang berbeda dari prinsipal dan agen, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau masalah keagenan. Untuk mengatasi potensi masalah ini, penting untuk memantau tindakan yang diambil prinsipal terhadap agen. Keterkaitan antara penelitian ini dengan teori keagenan terlihat jelas dalam pengurusan Dana Desa, dimana Pemerintah Desa berperan selaku pihak terpercaya yang

bertugas menyiapkan laporan-laporan yang diperlukan bagi para pemangku kepentingan. Sebagai penyelenggara pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Aparaturnya dituntut untuk mampu mengarahkan dan mengorganisasi pengelolaan Dana Desa serta menyajikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dan akuntabilitas menuntut orang-orang yang mempunyai jabatan publik untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas setiap keputusan dan perbuatannya serta bersikap transparan terhadap laporan pengurusan Dana Desa (Alauddin, 2020).

Kerja sama yang baik antara agen dan prinsipal dapat menghasilkan pengendalian internal yang baik. Disertai dengan kompetensi perangkat Desa yang memadai dapat meminimalisir risiko kecurangan yang dilakukan aparat Desa sehingga akuntabilitas pengelolaan Dana Desa meningkat.

B. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dalam pemerintahan Desa, akuntabilitas memegang peran penting dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini berarti bahwa pemerintahan Desa bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah. Akuntabilitas yang baik dapat tercapai ketika informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh masyarakat. Masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik, berhak memperoleh informasi keuangan guna menilai sejauh mana kinerja pemerintah (Aprilya, 2020).

Menurut Mardiasmo (2010) dalam (Nurkhasanah, 2019) mengatakan para penerima kepercayaan, seperti Kepala Desa dan Aparaturnya, memiliki kewajiban dalam menyampaikan laporan, memberikan penjelasan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas yang berada dalam lingkup wewenangnya kepada pihak yang memberi kepercayaan serta mempunyai wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Terkait pengelolaan sumber daya Desa, Kepala Desa berperan sebagai

pemimpin pelaksana dengan tugas utama mengawasi, menyiapkan, dan melaksanakan anggaran.

Varibel indikator pengelolaan dana desa dapat diukur dengan menggunakan instrumen penelitian yang digunakan oleh Nurkhasanah (2019). Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kejujuran dan transparansi informasi: mengacu pada tingkat kejujuran dan transparansi dalam penyajian informasi oleh Pemerintah Desa.
2. Kepatuhan dalam pelaporan keuangan: mengacu pada tingkat kesesuaian antara pelaporan keuangan yang dilakukan Pemerintah Desa dengan standar akuntansi yang berlaku.
3. Kesuaian prosedur: merupakan ketentuan prosedur dalam pengelolaan Dana Desa
4. Kecakupan informasi: mencakup kualitas dan kuantitas informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa.
5. Ketepatan penyampaian laporan: mengacu pada waktu dan cara penyampaian laporan oleh Pemerintah Desa.

C. Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Spencer dalam (Fajri et al., 2021) , kompetensi didefinisikan sebagai karakteristik mendasar yang dimiliki individu yang berkontribusi terhadap efektivitas kinerja mereka. Kompetensi ini mencakup sifat-sifat esensial yang secara langsung memengaruhi standar yang digunakan untuk menilai kinerja yang luar biasa atau unggul dalam konteks tertentu

Kompetensi merujuk pada karakteristik individu yang meliputi kemampuan, ilmu pengetahuan, dan keterampilannya dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi merupakan elemen kunci dalam upaya meningkatkan kapasitas Aparatur Desa untuk melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan dengan tingkat dedikasi yang tinggi, sehingga penyediaan sumber daya yang dapat dipercaya menjadi hal yang penting. Dedikasi tinggi dari Kepala Desa dan Aparaturnya akan memperkuat

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa (Ando et al., 2024).

Kompetensi merupakan bagian tak terpisahkan dari individu, melekat pada kepribadian mereka, dan berfungsi sebagai indikator perilaku serta kinerja dalam berbagai situasi dan tugas kerja. Individu yang kompeten mampu menunjukkan kinerja yang efektif sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Peningkatan kompetensi personel Desa dapat memperkuat pemahaman mereka tentang prosedur pengelolaan Dana Desa serta penerapannya, sehingga menciptakan pengelolaan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Sebaliknya, rendahnya kompetensi di bidang ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan dan ketidakselarasan dengan standar yang telah ditentukan. Ketidaktepatan ini tidak hanya menghambat pengambilan keputusan yang akuntabel tetapi juga gagal mencerminkan tanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa.

Berikut ialah indikator kompetensi Aparatur Desa menurut (Mada, 2017) dalam (Maharani, 2021) :

1. Pengetahuan: kumpulan informasi yang dimiliki individu dalam bidang tertentu.
2. Keahlian teknis: merupakan kemampuan menyelesaikan tugas dengan baik.
3. Kemampuan memecahkan masalah : kemampuan ini mengacu pada kompetensi Aparatur Desa dalam mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi yang efektif dan efisien.
4. Inisiatif dalam bekerja: Inisiatif dalam bekerja berarti aparat Desa tidak hanya menunggu instruksi atau perintah dari atasan, namun juga proaktif dalam mengambil tindakan yang diperlukan.
5. Keramahan dan kesopanan: kemampuan aparat Desa dalam berinteraksi dengan masyarakat dengan baik.

D. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Semuanya dirancang untuk memproses data dan menghasilkan informasi berkualitas tinggi yang dicirikan oleh akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu. Keuntungan dari pemanfaatan teknologi digital antaralain (1) memungkinkan pengambilan informasi yang diperlukan secara cepat dan tepat, (2) berfungsi sebagai alat untuk memperlancar penyebaran informasi, membuatnya lebih mudah diakses dan dipahami, dan (3) mendukung pengembangan keterampilan belajar melalui aplikasi berbasis teknologi yang selaras dengan kurikulum (Indraswari & Rahayu, 2021).

Penggunaan teknologi informasi mengacu pada kondisi pola pikir seorang akuntan, dimana mereka memanfaatkan teknologi tidak hanya untuk menyelesaikan tugas secara efisien tetapi juga untuk meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Proses ketenagakerjaan elektronik, sistem manajemen, pengolahan data, dan pengolahan informasi merupakan contoh pemanfaatan teknologi informasi (Rismawati, 2019).

Berikut indeks untuk mengukur adopsi teknologi informasi menurut Maharani (2021):

1. Terdapat perangkat lunak (*software*) yang mendukung: indikator ini mengukur keberadaan dan kecukupan perangkat lunak (*software*) yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional dan administrasi.
2. Ketersediaan jaringan internet: indikator yang mengukur aksesibilitas dan kualitas koneksi internet di Desa atau organisasi.
3. Dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan: indikator ini mengukur sejauh mana teknologi informasi dimanfaatkan sesuai aturan, prosedur, dan kebijakan yang telah ditetapkan.
4. Proses terkomputerisasi: indikator yang mengukur tingkat otomatisasi dalam berbagai proses dan kegiatan di suatu Desa atau organisasi.

E. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal ialah langkah penting yang dijalankan secara berkala oleh pimpinan bersama seluruh staff untuk memberi keyakinan bahwa mereka akan mampu mencapai tujuan organisasi, sebagaimana tertera pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 perihal Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Proses ini mencakup beberapa komponen utama yaitu, memastikan efektivitas dan efisiensi operasional, menjaga keakuratan pelaporan keuangan, menjaga aset negara, dan mematuhi ketentuan hukum. Selain itu, sistem pengendalian internal ini dirancang untuk mengidentifikasi potensi terjadinya kecurangan pada tahap awal, sehingga meminimalkan risiko kerugian negara. Pada akhirnya, sistem ini menumbuhkan budaya pengawasan di seluruh administrasi, yang meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam tata kelola publik (Nursin, 2022).

Berikut indikator pemanfaatan teknologi informasi menurut (Ambarwati et al., n.d.)

1. Lingkungan pengendalian : mencerminkan cara pandang keseluruhan suatu organisasi yang memengaruhi pemahaman karyawan serta perilaku yang berhubungan dengan pengendalian.
2. Penilaian risiko : Proses ini mencakup penentuan, evaluasi, dan mengelola risiko terkait dengan pembuatan pelaporan keuangan perusahaan berdasar kepada standar akuntansi yang berlaku umum.
3. Pengendalian aktivitas: Peraturan yang dirancang untuk menjamin bahwa instruksi manajemen guna memenuhi target pelaporan keuangan yang terukur.
4. Informasi dan komunikasi: terdiri dari aturan serta proses manajemen terkait sistem akuntansi yang dirancang untuk menghentikan kemungkinan kesalahan penyajian laporan manajemen dalam laporan keuangan.
5. Pemantauan: meliputi proses evaluasi secara berkesinambungan terhadap kualitas kinerja struktur

pengawasan internal dilakukan dengan langkah-langkah lanjutan berdasarkan temuan audit dan usulan tinjauan, evaluasi independen, dan pemantauan secara berkesinambungan.

F. Tingkat Pendidikan

Menurut Sikula dalam Mangkunegara (2009:50) dalam (Rezeki, 2019) , jenjang pendidikan dicirikan sebagai proses jangka panjang yang direncanakan secara sistematis di mana tenaga manajerial memperoleh informasi, konteks, dan teori untuk meraih tujuan yang luas.

Dari segi tingkat pendidikan, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan. Rendahnya tingkat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan Desa sehingga menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang artinya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional, Anggia (2020) menjabarkan indikator tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Tahapan pendidikan: Tahapan pendidikan dirancang sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan tujuan pendidikan siswa. Pendidikan dasar, menengah, dan pasca sekolah menengah termasuk pada tingkat ini.
2. Kesesuaian program studi : Merupakan sejauh mana pendidikan seseorang selaras dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan masyarakat.

G. Telaah Pustaka

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya untuk menguatkan hasil pengujian hipotesis, dan menjadi pembanding dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan penelitian ini tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

N o.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	(Putu Intandika Purbasari & Gede Adi Yuniarta, 2020)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jembrana	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi berdampak positif terhadap pengelolaan alokasi Dana Desa.	Variabel independen yang digunakan sama yaitu pemanfaatan teknologi informasi	Lokasi yang digunakan berbeda, variabel dependen yang digunakan berbeda
2.	(Meriana, 2022)	Pengaruh Aksesibilitas Informasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pelatihan Terhadap	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa aksesibilitas informasi, sistem pengendalian	Salah satu variabel independen (X) yang digunakan sama yaitu sistem pengendalian	Lokasi yang digunakan berbeda, variabel moderasi yang digunakan berbeda.

		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Peran Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)	an internal, pelatihan Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh positif antara aksesibilitas informasi, sistem pengendalian internal dan pelatihan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.	n internal. Variabel dependen (Y) yang digunakan sama.	
3.	(Maharani , 2021)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi Aparatur Desa dan pemanfaatan teknologi	Variabel independen (X) yang digunakan sama, variabel dependen (Y) yang	Lokasi yang digunakan berbeda, penelitian terdahulu menggunakan variabel intervening

		Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang)	informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sedangkan variabel Sistem pengendalian internal dapat memediasi hubungan variabel kompetensi Aparatur Desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.	digunakan sama	
--	--	---	---	-----------------------	--

4.	(rahmaindah, 2022)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi Aparatur Desa secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa namun tidak signifikan. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sistem pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas	Lokasi yang digunakan sama, variabel independen yang digunakan sama yaitu sistem pengendalian internal, variabel dependen yang digunakan sama yaitu akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.	Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi
----	--------------------	--	---	--	--

			pengelolaan Dana Desa.		
5.	(Rizka & Gowon, 2021)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Moderating (Studi	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaa	Variabel independen yang digunakan sama	Lokasi yang digunakan berbeda, variabel dependen yang digunakan berbeda

		Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Jambi)	n Keuangan Daerah. Kualitas Laporan Keuangan		
6.	(Mariyana , 2023)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Aparatur Daerah Sukoharjo)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.	Terdapat kesamaan pada salah satu Variabel independen (X) yang digunakan	Lokasi yang digunakan berbeda, variabel dependen (y) yang digunakan berbeda
7.	(Nursin et al., 2022)	Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan	Hasil penelitian ini menyatakan	Terdapat kesamaan pada salah satu	Lokasi yang digunakan berbeda, variabel

		Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi	n bahwa kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan Desa. Sementara itu, kecerdasan spiritual memperkuat pengaruh kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa.	variabel independen (x) yang digunakan	dependen (y) yang digunakan berbeda, variabel moderasi yang digunakan berbeda
8.	(Wibowo Djoko, 2022)	Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi,	Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah,	Variabel independen (X) yang digunakan sama	Lokasi yang digunakan berbeda, variabel dependen (Y) yang digunakan berbeda

		Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapin)	dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin. Sedangkan Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.		
9.	(Pahlawan et al., 2020)	Pengaruh kompetensi Aparatur Desa, sistem	Penelitian ini menemukan bahwa	Variabel independen (X) dan variabel	Penelitian terdahulu tidak menggunakan

		pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa	kompetensi Aparatur Desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.	dependen (Y) yang digunakan sama.	an variabel moderasi dan tidak mencantumkan lokasi penelitian.
10.	(Ambarwati et al., n.d., 2021).	Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Akseibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas	Variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) yang digunakan sama.	Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi. Lokasi yang digunakan berbeda.

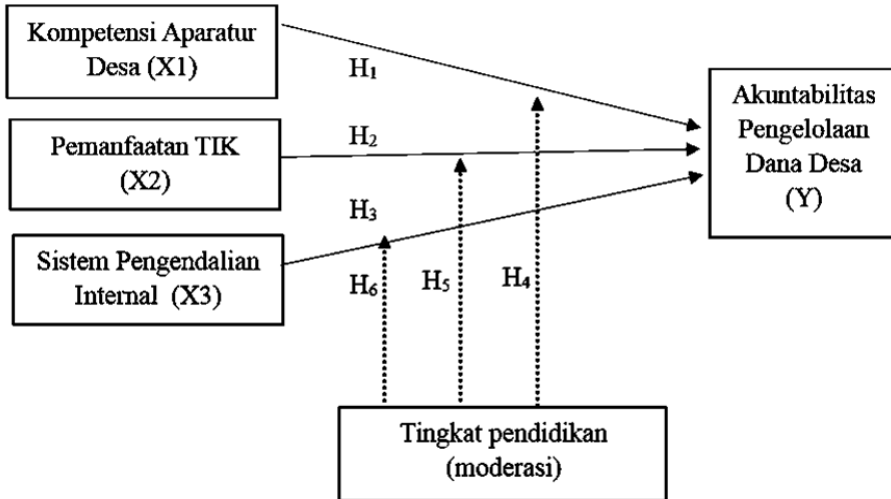
		akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa (Studi Kasus Kelurahan Margokaton Kabupaten Sleman Yogyakarta)	pengelolaan keuangan Dana Desa pada Kelurahan Margokaton Kabupaten Sleman Yogyakarta secara bersama – sama.		
11.	(Aprilya, 2020)	Pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa	penelitian ini menunjukkan kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas	Terdapat kesamaan pada salah satu variabel independen (X). Variabel dependen (Y) yang digunakan sama.	Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi dan tidak mencantumkan lokasi penelitian.

			s pengelolaa n Dana Desa		
12.	(Husain et al., 2023)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Pada saat aparat Desa menerapkan pengendalian internal yang baik maka akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa akan semakin efektif.	Variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) yang digunakan sama.	Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi dan tidak mencantumkan lokasi penelitian.

H. Kerangka Berpikir

Berikut ini merupakan hubungan variabel yang disusun dalam kerangka konseptual :

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



Kerangka berpikir diatas menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh langsung terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ditunjukkan dengan panah langsung). Sedangkan Tingkat Pendidikan berperan sebagai variabel moderasi, yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan dependen (ditunjukkan dengan panah putus-putus).

I. Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas merupakan prinsip utama yang harus dipenuhi agar penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Akuntabilitas pengelolaan dana desa mencakup aspek

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pihak berwenang (Sari, 2022).

Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi Aparatur Desa. Kompetensi Aparatur Desa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola Dana Desa. Kompetensi yang baik memungkinkan Aparatur Desa untuk memahami regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, menyusun laporan keuangan dengan benar, serta menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses pengelolaan dana desa.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), aparatur desa berperan sebagai agen yang bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai prinsipal dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, semakin kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan dana, ketidaktepatan pelaporan, maupun kurangnya transparansi dalam pengelolaannya. Sebaliknya, kompetensi yang rendah dapat menyebabkan lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman terhadap prosedur administrasi keuangan, dan berpotensi menurunkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebagaimana dikemukakan oleh (Pahlawan et al., 2020), bahwa kompetensi Aparatur Desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Di dukung oleh temuan (Ariani, 2021), yang menyatakan hal serupa.

H1 : Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana desa dilakukan secara transparan, efisien, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah

pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi memungkinkan adanya sistem yang lebih terstruktur dalam pencatatan keuangan, pelaporan anggaran, serta pengawasan dana desa, sehingga dapat mengurangi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana. Dengan adanya sistem berbasis teknologi, pemerintah desa dapat mengelola anggaran dengan lebih baik, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses pelaporan kepada pihak terkait.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta aplikasi lain yang mendukung pencatatan keuangan secara digital. Teknologi ini membantu aparat desa dalam mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi, serta mempercepat akses terhadap data keuangan yang valid. Selain itu, teknologi informasi juga memungkinkan adanya sistem pemantauan secara real-time oleh pemerintah daerah atau pusat, sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Indraswari & Rahayu, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Alauddin, 2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Didukung oleh penelitian (Nurkhasanah, 2019) yang menyatakan hal yang sama.

H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan akuntabilitas adalah sistem pengendalian internal (SPI). Sistem pengendalian internal mencakup serangkaian kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengawasan yang dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai

dengan prinsip transparansi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Sistem pengendalian internal terdiri dari lima komponen utama menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dana, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap tahapan penggunaan dana desa. Dengan adanya sistem pengendalian yang kuat, peluang terjadinya korupsi, kesalahan pencatatan, atau pelanggaran prosedur dapat diminimalkan, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat lebih terjamin (Puspa & Prasetyo, 2020).

Berdasarkan teori agensi (*agency theory*), aparatur desa berperan sebagai agen yang harus mengelola dana desa sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagai prinsipal. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat berfungsi sebagai alat untuk mengawasi dan memastikan bahwa aparatur desa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal diduga memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut penelitian (Mualifu & Guspul, 2019), sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Di dukung oleh penelitian (Sutrepti et al., 2022) yang menyatakan hal serupa.

H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

4. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Moderasi

Agar dana desa dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab, dibutuhkan aparatur desa yang kompeten.

Kompetensi ini mencakup pemahaman terhadap aturan, kemampuan mengelola keuangan, serta sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, semakin baik mereka dalam menyusun laporan keuangan dan mengelola dana desa dengan efektif. Namun, faktor lain seperti tingkat pendidikan juga bisa mempengaruhi hubungan ini, apakah memperkuat atau justru melemahkannya.

Tingkat pendidikan berperan dalam menentukan sejauh mana kompetensi aparatur desa bisa diterapkan dengan baik. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah bagi mereka untuk memahami aturan keuangan, mengelola administrasi, dan berpikir secara analitis dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, mereka juga lebih cepat beradaptasi dengan sistem berbasis teknologi yang mempermudah pengelolaan keuangan desa. Dengan kata lain, jika aparatur desa memiliki pendidikan yang lebih tinggi, maka kompetensi mereka akan lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebaliknya, jika tingkat pendidikan rendah, meskipun mereka punya pengalaman atau keterampilan, efektivitasnya dalam menjaga transparansi dan pertanggungjawaban keuangan bisa saja berkurang.

Tingkat pendidikan berpotensi memoderasi relasi kompetensi Aparatur Desa dengan akuntabilitas pengurusan Dana Desa. Pendidikan tinggi dapat menambah kapasitas Aparatur Desa dalam memahami dan menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik, sehingga mampu mengelola Dana Desa dengan lebih efektif dan meraih tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Kesuksesan dalam pengurusan Dana Desa sangat ditentukan oleh kemampuan aparat Desa dalam mengatur Dana tersebut. Senada dengan penelitian (Rezeki, 2019) , tingkat pendidikan diketahui memperkuat hubungan kompetensi Aparatur Desa terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.

H4 : Tingkat Pendidikan dapat memoderasi Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Tingkat Pendidikan selaku Variabel Moderasi

Penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu solusi yang bisa membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Teknologi memungkinkan pencatatan dan pelaporan keuangan desa dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Contohnya, dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), aparatur desa bisa lebih mudah menyusun laporan, mengontrol penggunaan dana, dan memastikan informasi keuangan dapat diakses dengan jelas oleh masyarakat maupun pemerintah pusat. Namun, keberhasilan pemanfaatan teknologi ini tidak hanya bergantung pada alat yang tersedia, tetapi juga pada kemampuan aparatur desa dalam menggunakannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan ini adalah tingkat pendidikan.

Pendidikan bisa berperan dalam memperkuat atau melemahkan dampak teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih cepat memahami cara kerja sistem keuangan berbasis teknologi. Dengan pengetahuan yang lebih baik, mereka dapat menggunakan sistem informasi keuangan secara optimal sehingga laporan yang dihasilkan lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, jika aparatur desa memiliki tingkat pendidikan yang rendah, mereka bisa mengalami kesulitan dalam mengoperasikan teknologi. Kesalahan dalam memasukkan data, kurangnya pemahaman terhadap laporan keuangan, atau ketidaktepatan dalam penggunaan sistem bisa membuat manfaat teknologi tidak maksimal. Walaupun perangkat teknologi sudah tersedia, tanpa kemampuan yang memadai, hasilnya tetap tidak optimal. Oleh karena itu, tingkat

pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana teknologi bisa benar-benar membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penelitian (Raditya, 2022) mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan berdampak positif terhadap efektivitas pemanfaatan teknologi informasi.

H5 : Tingkat Pendidikan dapat memoderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

6. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Moderasi

Sistem pengendalian internal yang baik diperlukan untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sistem ini mencakup berbagai aturan dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai ketentuan, mencegah terjadinya penyimpangan, serta mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam pencatatan atau pelaporan keuangan. Jika sistem pengendalian internal diterapkan dengan baik, risiko penyalahgunaan dana bisa dikurangi, dan aparatur desa akan lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya. Namun, efektivitas sistem ini tidak hanya bergantung pada keberadaannya, tetapi juga pada pemahaman dan kemampuan aparatur desa dalam menjalankannya. Salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah tingkat pendidikan aparatur desa.

Aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi umumnya lebih memahami bagaimana sistem pengendalian internal bekerja, seperti pemisahan tugas, proses verifikasi, dan pencatatan keuangan yang benar. Mereka juga lebih teliti dalam menerapkan prosedur keuangan dan lebih sadar akan pentingnya menaati aturan yang ada. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka dapat menjalankan sistem pengendalian internal secara lebih efektif, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa meningkat.

Dengan demikian, tingkat pendidikan berperan penting dalam memperkuat atau melemahkan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika aparatur desa memiliki pendidikan yang cukup, mereka lebih siap untuk menerapkan sistem ini dengan baik. Sebaliknya, jika tingkat pendidikan rendah, efektivitas sistem pengendalian internal bisa menurun, sehingga diperlukan upaya tambahan, seperti pelatihan atau pengawasan yang lebih ketat, agar dana desa tetap dikelola dengan transparan dan akuntabel. Artinya, semakin tinggi pendidikan aparatur desa, semakin besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa.

H6 : Tingkat Pendidikan dapat memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan . Dalam penelitian ini, peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data secara empiris melalui penyebaran kuisioner. Secara khusus, data didapat lewat survei yang disebarkan kepada mereka yang terlibat aktif dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ketanggungan.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis sampel dan populasi, sampel diambil secara acak, pengumpulan data memakai instrumen studi terstruktur, dan analisis selanjutnya menggunakan kerangka statistik. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efektivitas. Teknik kausalitas digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan interaksi sebab-akibat antar variabel dalam konteks obyek penelitian (rahmaindah, 2022).

B. Populasi

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh Perangkat Desa yang berjumlah 168 yang tersebar di 21 Desa di Kecamatan Ketanggungan. Desa-Desa tersebut adalah Desa Buara, Baros, Ciduwet, Bulakelor, Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul, Dukuh Tengah, Ciseureuh Dukuh Badag, Dukuturi, Jemasih, Karangmalang, Ketanggungan, Kubangjati, Kubangsari, Kubangwungu, Padakaton, Pamedaran, Karangbandung Sindangjaya, dan Tanggungsari.

C. Sampel

Strategi pengambilan sampel pada studi ini memanfaatkan teknik *Nonprobability sampling*, di mana tidak setiap individu dalam populasi mempunyai probabilitas yang sama untuk dipilih. Metode yang dipilih dalam studi ini ialah *purposive sampling*, yaitu pemilihan

sampel mengacu pada standar yang sudah ditentukan sebelumnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2019: 133). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Aparatur desa yang termasuk sebagai pengelola keuangan desa pada kantor Desa yang terletak di Kecamatan Ketanggungan. Berdasarkan Permendagri No.84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, aparatur desa yang termasuk sebagai pengelola keuangan desa meliputi Kepala desa, Sekretaris desa, dan Kaur keuangan.

Dari 21 OPD di Kecamatan Ketanggungan, peneliti mengambil 3 orang aparatur desa dari masing-masing OPD untuk menjadi sampel penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 63 aparatur desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan teknik survei, dimana peneliti membuat daftar pernyataan dalam bentuk kuisioner yang dibagikan kepada informan di Desa masing-masing dalam wilayah Kecamatan Ketanggungan. Penyebaran dan pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada seluruh responden dengan teknik survey mandiri (*self administered survey*) yaitu metode pengumpulan data primer yang dalam hal ini responden diminta untuk mengisi jawaban sendiri pada kuisioner yang diberikan. Kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan mengenai suatu topik yang akan diteliti kepada responden yang bersangkutan yang kemudian dijawab dengan skala likert/angka. Kuisioner dirancang dengan pernyataan terstruktur, sehingga responden dapat memilih jawaban dari pilihan jawaban yang telah ditentukan. Pengukuran dijalankan dengan memakai *skala likert*, yakni skala yang dipakai untuk menilai persepsi dan sikap individu atau

kelompok terhadap gejala sosial. Pada *skala Likert*, setiap respons diberi nilai yang mencerminkan intensitas reaksi, mulai dari sangat positif hingga sangat negatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono. Skala tersebut disusun sebagai berikut:

- Sangat setuju : 5
- Setuju : 4
- Netral : 3
- Tidak setuju : 2
- Sangat tidak setuju : 1

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus, prediktor, antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel Dependen (terikat).

2. Variabel Dependen

Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016).

Tabel 2.1**Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional terdiri dari sekumpulan instruksi mengenai cara mengukur variabel yang telah didefinisikan secara konseptual. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

N o	Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala
1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang didelegasikan kepada entitas pelapor dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010)	-Kejujuran dan Keterbukaan informasi -Kepatuhan dalam pelaporan -Kesesuaian prosedur -Kecakupan informasi -Ketepatan penyampaian laporan (Nurkhasana, 2019)	<i>Skala likert 1-5</i>
2	Kompetensi Aparatur Desa (X1)	Kompetensi aparat Desa mengacu pada kemampuan kinerja setiap	- pengetahuan -Keahlian teknis	<i>Skala likert 1-5</i>

		individu, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang memenuhi standar yang telah ditentukan.	-Kemampuan memecahkan masalah -Inisiatif dalam bekerja -Sikap ramah dan sopan (Nurkhasana h, 2019)	
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	Teknologi adalah sistem yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, menangkap, menafsirkan, menyimpan, dan mengatur data sebaik mungkin (Maharani, 2021).	-Terdapat Aparatur lunak yang mendukung -Tersedianya jaringan internet -Digunakan sesuai ketentuan -Proses terkomputerisasi (Maharani, 2021)	<i>Skala likert 1-5</i>
4	Sistem Pengendalian Internal (X3)	Sistem pengendalian internal adalah suatu proses integral yang mencakup tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara	-Lingkungan pengendalian -Penilaian risiko -Aktivitas pengendalian -Informasi dan komunikasi	<i>Skala likert 1-5</i>

		berkesinambungan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (SPIP PP No. 60 Tahun 2008).	-Pemantauan pengendalian internal (Ambarwati et al.,n.d)	
5	Tingkat Pendidikan (Z)	Pendidikan adalah suatu proses, teknik, dan metode pembelajaran yang bertujuan untuk mentransfer	-Jenjang pendidikan -Kesesuaian pendidikan dengan pekerjaan (Anggia, 2020)	<i>Skala liker t 1-5</i>

		ilmu pengetahuan dari seseorang ke orang lain melalui prosedur yang terstruktur dan sistematis, yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama.		
--	--	--	--	--

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan responden penelitian (nama responden, jenjang pendidikan, tingkat jabatan, lama masa kerja, jenis kelamin, umur). Penelitian juga menggunakan statistik deskriptif berupa mean, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum dari masing-masing variabel.

2) Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Menurut Ghazali (2013:52), uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah kuesioner benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, kuesioner dianggap valid jika pertanyaan-pertanyaan di dalamnya mampu merepresentasikan konsep atau variabel yang ingin diteliti. Pengujian ini biasanya

dilakukan dengan bantuan software statistik seperti SPSS.

Untuk mengetahui tingkat validitas, dilakukan analisis korelasi antara skor tiap butir pertanyaan dengan total skor dari keseluruhan pertanyaan dalam satu variabel. Dalam pengujian ini, hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa skor pertanyaan memiliki hubungan yang positif dengan total skor variabel, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menyatakan sebaliknya. Hasil uji dianggap signifikan (atau valid) jika nilai korelasi (r hitung) lebih besar dari nilai r tabel serta nilai signifikansi $< 0,05$. Dalam penelitian ini, validitas diuji menggunakan korelasi Pearson, yaitu dengan mengukur hubungan antara skor masing-masing pertanyaan dan total skor seluruh pertanyaan dalam satu konstruk.

b) Uji Realibilitas

Salah satu metode efektif pengukuran kuesioner yang berfungsi sebagai indikator variabel adalah melalui pengujian reliabilitas. Sebuah kuesioner dinilai reliabel jika respons individu pada pernyataan yang dibagikan tetap stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengevaluasi reliabilitas ini, peneliti menggunakan *Cronbach's Alpha* sebagai metode pengujian. Dalam SPSS, reliabilitas dapat dinilai dengan menggunakan uji statistik Cronbach's Alpha (α). Sebuah konstruk atau variabel dianggap reliabel jika menghasilkan nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2016) (dalam Hardyansyah, n.d.).

3) Uji Asumsi Klasik

a) Uji normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel dependen dan independen pada model regresi terdistribusi

normal. Jika data terdistribusi secara normal atau hampir terdistribusinormal, model regresi akan optimal. Pengujian dengan SPSS 15 berupa uji Kolmogrov Smirnov diperlukan untuk mengidentifikasi nilai tersebut. Berdasarkan kriteria uji normalitas, suatu data dianggap berdistribusi normal apabila angka signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05. Sebaliknya data tidak terdistribusi normal jika angka signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05. Uji statistik t tidak dapat diterapkan jika data tidak terdistribusi secara teratur. (Ghozali, Imam, 2016) (dalam (Sarah et al., 2020) .

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memahami derajat relasi bebas antara variabel independen dan dependen. Model regresi ini dianggap mempunyai masalah multikolinearitas jika pengujian menunjukkan variabel independen dan dependen mempunyai korelasi tunggal. Gejala multikolinearitas harus dihilangkan dari suatu model agar dapat melakukan analisis regresi. Sekalipun uji parsial tidak signifikan atau bernilai lebih dari 0,05, namun nilai R Square yang lebih besar dapat digunakan untuk menentukan apakah model menunjukkan gejala multikolinearitas. Dengan memeriksa nilai toleransi dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*, dapat diketahui apakah model regresi akhir menunjukkan gejala multikolinearitas. Teori diuji dalam kasus ini

- $H_0 : VIF < 10$ menunjukkan tidak ada gejala multikolinearitas

- $H_0 : VIF > 10$ menunjukkan adanya gejala multikolinearitas

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi tetap konstan, suatu kondisi yang dikenal sebagai homoskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya menunjukkan homoskedastisitas daripada heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ditunjukkan oleh pola tertentu dalam diagram sebar. Pola titik-titik yang membentuk bentuk gelombang menandakan adanya heteroskedastisitas. Di sisi lain, jika titik-titik terdistribusi secara acak di atas dan di bawah nol pada sumbu Y tanpa pola yang teridentifikasi, ini menandakan tidak adanya heteroskedastisitas.

4) Pengujian Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu kompetensi Aparatur desa (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), dan sistem pengendalian internal (X3) terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Rumusannya ialah sebagai berikut :

$$Y = a + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntansi Pengelolaan Dana Desa

A = Nilai intersep (konstanta)

X1 = Kompetensi Aparatur Desa

X2	=	Pemanfaatan Teknologi Informasi
X3	=	Sistem Pengendalian Internal
B1-B3	=	Koefisien regresi
e	=	Error (tingkat kesalahan)

5) Analisis Regresi dengan Variabel Moderasi

Salah satu jenis penelitian yang menggunakan variabel moderasi dalam model hubungannya adalah analisis regresi dengan variabel moderasi. Pengujian ini menggunakan analisis interaksi linier atau disebut juga dengan *Moderated Regresi Analysis (MRA)*, dimana persamaan regresinya mencakup komponen interaksi (perkalian dua atau lebih variabel bebas).

Berikut rumus *MRA* :

$$Y = a + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + B4 X1 Z + B5 X2 Z + B6 X3 Z + e$$

Y	=	Akuntansi Pengelolaan Dana Desa
a	=	Nilai intersep (konstanta)
X1	=	Kompetensi Aparatur Desa
X2	=	Pemanfaatan Teknologi Informasi
X3	=	Sistem Pengendalian Internal
B1-B5	=	Koefisien regresi
Z	=	Tingkat Pendidikan
e	=	Error (tingkat kesalahan)

Apabila hasil uji ini menunjukkan beta yang dihasilkan dari interaksi XZ terhadap Y bernilai negatif, maka variabel moderasi Z memperlemah pengaruh variabel X terhadap variabel Y, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Begitu pula sebaliknya, jika beta menghasilkan nilai positif, maka variabel moderasi Z memperkuat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Variabel perkalian (interaksi) antara X dan Z merupakan variabel moderator yang menggambarkan pengaruh moderasi Z (tingkat pendidikan) terhadap hubungan X (kompetensi Aparatur Desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal) dan Y (akuntabilitas pengelolaan Dana Desa). Variabel Z dapat dikatakan sebagai variabel moderator, jika koefisien regresinya bernilai negatif dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari α sebesar 5% (Ghozali, 2011:239). Hipotesis untuk menguji efek variabel moderator dalam penelitian ini ialah:

$$H_0: \beta_1 X_1.Z - \beta_5 X_5.Z = 0$$

$$H_1: \beta_1 X_1.Z - \beta_5 X_5.Z \neq 0$$

Kriteria pengambilan keputusan efek variabel moderator dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas variabel moderator $> \alpha$ (0.05) maka H_0 ditolak, artinya tingkat pendidikan tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel X terhadap Y.
2. Jika nilai probabilitas variabel moderator $< \alpha$ (0.05) maka H_0 diterima, artinya tingkat pendidikan mampu memoderasi hubungan antara variabel X terhadap Y.

Pengujian efek moderasi dapat dilakukan jika hubungan langsung variabel independen terhadap dependen mempunyai nilai signifikan. Jika hal tersebut tidak terjadi maka pengujian efek moderasi tidak dapat dilanjutkan (Abdillah & Hartono, 2015:231).

6) Uji Kelayakan Model

1) Uji Statistik T

Uji statistik t pada hakikatnya dipakai untuk menilai kontribusi setiap variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2017:98). Untuk mengevaluasinya, nilai t yang dihitung dikomparasikan dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi (α) 5%. Derajat kebebasan (df) diestimasi memakai rumus $df = n - K - 1$, di mana n menyatakan ukuran sampel dan K menyatakan jumlah variabel independen. Pada titik ini, hipotesis akan diterima atau ditolak berdasarkan perbandingan kedua nilai tersebut. Menggunakan kriteria pengujian berikut :

- a. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan variabel bebas tidak berdampak secara signifikan pada variabel terikat.
- b. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $< 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan secara parsial salah satu variabel independen berdampak signifikan pada variabel dependen.

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ialah ukuran yang dipakai untuk menilai seberapa efektif model memperhitungkan ragam dalam variabel dependen. Nilai R^2 yang rendah menandakan jika variabel independen tidak secara efektif menjabarkan ragam ini. Pada studi ini R-kuadrat yang disesuaikan ($\text{Adj } R^2$) karena melibatkan beberapa variabel independen. Jika hanya ada satu variabel independen, R^2 cukup untuk

menggambarkan dampaknya terhadap variabel dependen. Persamaan koefisien determinasi sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi yang dikuadratkan

Adapun Kriteria uji koefisien R (Square) sebagai berikut:

- a. Nilai R-square yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
- b. Nilai R-square yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.
- c. Nilai R-square yang berada di atas 0,5 bisa dikatakan baik, sedangkan nilai di bawah 0,5 bisa dikatakan tidak baik (Gozali, 2016).

Tabel 3.1
Kriteria Uji koefisien R
(Square)

Nilai R^2	Kategori Pengaruh
$R^2 > 0.67$	Kuat: Model menjelaskan lebih dari 67% variasi variabel dependen.
$0.33 < R^2 \leq 0.67$	Moderat: Model menjelaskan antara 33%

	hingga 67% variasi variabel dependen.
$R^2 < 0.33$	Lemah: Model menjelaskan kurang dari 33% variasi variabel dependen.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Ketanggungan, yang terletak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, memiliki luas wilayah sekitar 153,41 km² (15.341 ha), menjadikannya salah satu kecamatan terluas di kabupaten ini. Wilayahnya terbagi menjadi 21 desa, dengan Desa Jemasih sebagai desa terluas. Kecamatan ini berada di bagian tengah Kabupaten Brebes dan memanjang dari utara ke selatan. Secara geografis, wilayahnya mencakup dataran rendah hingga perbukitan di bagian selatan, seperti di Desa Cikeusal dan Jemasih.

Jumlah penduduk Kecamatan Ketanggungan mencapai sekitar 96.643 jiwa, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Bahasa yang digunakan bervariasi, tergantung pada lokasi, sebagian selatan cenderung menggunakan Bahasa Sunda Brebes, sementara bagian utara menggunakan Bahasa Jawa.

Secara administratif, Kecamatan Ketanggungan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung dan Kersana di utara, Kecamatan Larangan di timur, Kecamatan Salem dan Bantarkawung di selatan, serta Kecamatan Banjarharjo dan Kersana di barat. Wilayah ini juga memiliki sejumlah sungai utama seperti Sungai Babakan dan Sungai Buntiris yang mendukung irigasi pertanian.

Dalam sektor ekonomi, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, dengan komoditas utama berupa padi dan bawang merah. Selain itu, sektor perdagangan dan industri kecil juga turut berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Pemerintah pusat memberikan dana desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di masing-masing desa dalam kecamatan ini. Dengan potensi geografis dan ekonomi yang dimilikinya, Kecamatan Ketanggungan menjadi wilayah strategis untuk penelitian terkait sosial-ekonomi serta pengelolaan sumber daya alam.

B. Deskripsi Data

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan yang termasuk dalam pengelola keuangan Desa di 21 OPD Kecamatan Ketanggungan. Peneliti menyebarkan 63 kuisioner dan seluruh kuisioner kembali.

Tabel 4. 1
Tingkat Pengembalian Kuisioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisioner yang disebar	63	100%
Kuisioner yang tidak kembali	0	0%
Kuisioner yang tidak diisi lengkap	-	0%
Kuisioner yang kembali	63	92,7%
Total		100%

(Sumber: Data primer tahun 2025, diolah)

Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jabatan. Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis kelamin, usia, pendidikan dan jabatan.

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, tabel dibawah ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 44 responden (69,8%), dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 19 responden (32,8%).

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Laki-laki	44	69,8%
Perempuan	19	30,2%
Total	63	100%

b. Usia

Berdasarkan usia responden, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berumur antara 30-39 tahun sebanyak 23 responden (37%), serta berumur antara 40-49 tahun sebanyak 29 responden (46%). Sedangkan, responden yang berumur responden yang berumur lebih dari 50 tahun sebanyak 11 responden (17%) dalam penelitian ini.

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
30-39	23	37%
40-49	29	46%
>50	17	17%
Total	63	100%

c. Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan SMA yaitu sebanyak 34 responden (54%), pendidikan S-1 sebanyak 26 responden (41,3%), responden dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 3 responden (4,7%).

Tabel 4. 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SMP/Sederajat	3	4,7%
SMA/Sederajat	34	54%
Sarjana	26	41,3%
Total	63	100%

d. Jabatan

Berdasarkan Jabatan, tabel berikut menunjukkan bahwa Jabatan Kepala Desa sebanyak 21 responden, Sekertaris Desa sebanyak 21 responden, dan Kaur Keuangan sebanyak 21 responden.

Tabel 4. 5

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Frekuensi	Persentase
Kepala Desa	21	33,33%
Sekretaris Desa	21	33,33%
Kaur Keuangan	21	33,33%
Total	63	100%

C. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan sampel pertanyaan yang telah disebar. Analisis deskriptif meliputi mean, median, maximum, minimum, dan standar deviasi jawaban dari responden untuk tiap variabel. Statistik deskriptif menggambarkan persepsi perangkat desa terhadap pernyataan yang telah diajukan atas tiap-tiap variabel. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4. 6

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	63	20	34	27,13	3,415
X2	63	12	25	19,63	3,204
X3	63	19	40	31,56	4,230
Y	63	11	29	24,48	3,058
Z	63	11	20	16,70	2,339

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Dari hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 4.6 diatas, sehingga bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Kompetensi Aparatur Desa (X1) mendapatkan nilai minimum sejumlah 20, nilai maksimum sejumlah 34, rata-rata sejumlah 27,13, dan standar deviasi sebesar 3,415 dengan jumlah 63 sampel.
2. Pemanfaatn Teknologi Informasi (X2) mendapatkan nilai minimum sejumlah 12, nilai maksimum sejumlah 25, rata-rata sebesar 19,63, dan standar deviasi sejumlah 3,204 dengan jumlah 63 sampel.
3. Sistem Pengendalian Internal (X3) mendapatkan nilai minimum sejumlah 19, nilai maksimum sejumlah 40, rata-rata sebesar 31,56, dan standar deviasi sejumlah 4,230 dengan jumlah 63 sampel..
4. Akuntabilitas Pengelola Dana Desa (Y) mendapatkan nilai minimum sejumlah 11, nilai maksimum sejumlah 29, rata-rata sejumlah 24,48, dan standar deviasi sejumlah 3,058 dengan jumlah 63 sampel
5. Tingkat Pendidikan (Z) mendapatkan nilai minimum sejumlah 11, nilai maksimum sejumlah 20, rata-rata sebesar 16,70, dan standar deviasi sejumlah 2,339 dengan jumlah 63 sampel.

D. Uji Kualitas Data

Sebelum menganalisis data yang telah terkumpul, data yang da terlebih dahulu harus diuji kebenarannya. Adapun uji data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah pengujian yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dipakai untuk membantu peneliti memastikan bahwa instrumen yang digunakan memang mengukur konsep yang relevan dengan penelitian. Instrumen yang valid menghasilkan data yang lebih

dapat dipercaya dan akurat, sehingga meningkatkan kualitas dan kredibilitas hasil penelitian.

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan metode *Pearson Product Momment*, nilai signifikansi apabila memenuhi syarat $R_{hitung} > R_{tabel}$. Untuk mengetahui nilai R_{tabel} dalam penelitian ini, maka dapat ditentukan berdasarkan jumlah responden dengan *alpha* 5%. Sehingga diperoleh nilai R_{tabel} sebesar 0,244. Untuk hasil uji validits dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 7
Hasil Uji Validitas

VARIABEL	PERTANYAAN	VALIDITAS		Keterangan
		Rtabel	Rhitung	
Kompetensi Aparatur Desa	X1.1	0,244	0,641	VALID
	X1.2	0,244	0,592	VALID
	X1.3	0,244	0,695	VALID
	X1.4	0,244	0,589	VALID
	X1.5	0,244	0,524	VALID
Pemanfaatan Teknologi Informasi	X2.1	0,244	0,540	VALID
	X2.2	0,244	0,645	VALID
	X2.3	0,244	0,783	VALID
	X2.4	0,244	0,552	VALID
	X2.5	0,244	0,640	VALID
Sistem Pengendalian Internal	X3.1	0,244	0,580	VALID
	X3.2	0,244	0,634	VALID
	X3.3	0,244	0,651	VALID
	X3.4	0,244	0,542	VALID
	X3.5	0,244	0,658	VALID
	X3.6	0,244	0,594	VALID
	X3.7	0,244	0,556	VALID
	X3.8	0,244	0,549	VALID
	Y.1	0,244	0,508	VALID

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Y.2	0,244	0,610	VALID
	Y.3	0,244	0,730	VALID
	Y.4	0,244	0,725	VALID
	Y.5	0,244	0,513	VALID
	Y.6	0,244	0,474	VALID
Tingkat Pendidikan	Z.1	0,244	0,617	VALID
	Z.2	0,244	0,698	VALID
	Z.3	0,244	0,816	VALID
	Z.4	0,244	0,663	VALID

2. Uji Reliabilitas

Instrumen yang telah dikonfirmasi validitasnya, kemudian akan melalui proses pengujian reliabilitas. Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi seberapa jauh hasil dari perhitungan dan pengukuran selalu konsisten. Suatu instrumen dianggap reliabel apabila hasil Cronbach's Alphanya $>0,6$. Hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Reliabilitas

VARIABEL	CROMBACH'S ALPHA	N of ITEM	KETERANGAN
Kompetensi Aparatur Desa	0,737	5	RELIABEL
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,752	5	RELIABEL
Sistem Pengendalian Internal	0,736	8	RELIABEL

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,735	6	RELIABEL
Tingkat Pendidikan	0,653	4	RELIABEL

Sumber: data primer yang diolah, 2025

E. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas dijalankan untuk mencari tahu hubungan model regresi tunggal dengan ketiga variabel yang tersedia apakah mempunyai distribusi data yang normal atau tidak (Sugiyono, 2024). Dalam penelitian ini memakai *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikan 5%, dan normal probability plot untuk uji normalitasnya. Hasil uji normalitas untuk seluruh model penelitian dengan jumlah data sebanyak 63 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000
	Std. Deviation	2,61778
Most Extreme Differences	Absolute	,099
	Positive	,070
	Negative	-,099
Test Statistic		,099
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Dari hasil uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diatas, mendapatkan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Dengan hasil yang didapatkan memberikan kesimpulan bahwasannya data residual untuk model regresi ini tersebar dengan normal, dikarenakan nilai yang didapat untuk Asymp.Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan guna mengetahui apakah pada model regresi memiliki hubungan antar variabel bebas. Apabila tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka model regresi yang diujikan adalah model regresi yang baik. Dalam mendeteksi keberadaan multikolinearitas di dalam model regresi, bisa ditentukan melalui nilai uji VIF dan *tolerance*. Apabila nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance* > 0,10 berarti terdapat multikolinearitas.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	,580	1,723
	X2	,543	1,841
	X3	,875	1,142
	Z1	,935	1,070

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan variabel independen dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinieritas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan guna mengetahui apakah varian dari eror dalam model regresi bersifat konstan atau tidak. Apabila varian dari error tidak konstan, maka terjadi heteroskedastisitas. (Sugiyono, 2024). Uji heteroskedastisitas pada riset ini memakai uji glejser. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Sig.
1	(Constant)	,899
	X1	,550
	X2	,685
	X3	,945
	Z1	,085

a. Dependent Variable: ABS_RES

Dari hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan, menggunakan uji glejser mendapatkan hasil semua variabel independen mendapatkan nilai signifikan $> 0,05$. Dengan hasil tersebut bisa diartikan bahwa model regresi yang diujikan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, serta dapat dipakai untuk analisis selanjutnya.

F. Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah sebuah tahap statistik yang dipakai untuk menguji kebenaran suatu asumsi. Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini diantaranya:

1. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu kompetensi Aparatur desa (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), dan sistem pengendalian internal (X3) terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui dampak lebih dari 1 lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis ini juga bertujuan untuk mengukur intensitas keterkaitan antar variabel-variabel tersebut.

Tabel 4.12
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	22,007	1,462
	X1	,167	,071
	X2	,340	,064
	X3	,034	,038
a. Dependent Variable: Y			

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 22,007 (a) + 0,167 (X1) + 0,340 (X2) - 0,034 (X3)$$

Keterangan:

Y = Akuntansi Pengelolaan Dana Desa

A = Nilai intersep (konstanta)

X1 = Kompetensi Aparatur Desa

X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X3 = Sistem Pengendalian Internal

B1-B3 = Koefisien regresi

e = Error (tingkat kesalahan)

Dari hasil regresi yang didapat, maka bisa dijelaskan bahwa keterkaitan antara variabel independen dengan

dependen terjalin dengan baik secara parsial maupun simultan dengan penjelasan sebagai berikut:

- A : 22,007 artinya setiap penambahan pada kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi dan informasi, dan sistem pengendalian internal yang termasuk dalam variabel bebas, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa bertambah sebesar 22,007 sebagai nilai konstan variabel terkait.
- X1 : 0,167, diartikan setiap peningkatan kompetensi aparatur desa akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,167
- X2 : 0,340, diartikan setiap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,340
- X3 : 0,034 artinya setiap sistem pengendalian internal akan memberikan pengaruh peningkatan akuntansi pengelolaan dana desa sebesar 0,034
- ε : Error

2. Uji Signifikan Parameter Individual (uji Statistik t)

Uji statistik t dipakai guna mengetahui berapa besar dampak satu variabel independen secara tersendiri dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai signifikansi variabel dependennya $< 0,05$ maka variabel tersebut memberikan dampak signifikan. Berikut hasil uji statistik t yang disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4. 13
Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	15,052	,000
	X1	2,341	,023
	X2	5,314	,000
	X3	,903	,370

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel 4.13 diatas, diketahui bahwasannya hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, dengan nilai alpha 0,05 dan nilai t_{tabel} sebesar ($df = 63 - 5; 0,05$), maka bisa dijabarkan sebagai berikut:

- a. Variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) ($\text{sig} = 0,023$ dan $t_{hitung} = 2,341$). Dengan demikian nilai $\text{Sig} < \text{nilai alpha}$ ($2,341 < 0,05$), dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,341 > 1,671$) Dari hasil tersebut, artinya H_1 diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat diartikan bahwa Kompetensi Aparatur Desa (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) ($\text{Sig} = 0,000$ dan $t_{hitung} 5,314$) dengan demikian nilai $\text{Sig} < \text{nilai alpha}$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,314 > 1,671$). Dari hasil tersebut artinya H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang dapat diartikan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- c. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) ($\text{Sig} = 0,370$ dan $t_{hitung} = 0,903$) dengan demikian nilai $\text{Sig} > \text{nilai alpha}$ ($0,370 > 0,05$) dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,903 < 1,671$). Dari hasil tersebut artinya H_0 diterima dan H_3 ditolak, sehingga

dapat diartikan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) tidak memiliki pengaruh signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Hasil Uji Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis merupakan metode ilmiah yang menjaga keaslian sampel dan memberi dasar untuk mengatur dampak variabel moderasi.

Tabel 4. 11
Hasil Uji MRA

Model	t	Sig.
(Constant)	157,671	,000
X1.2	,864	,392
X2.2	2,406	,019
X3.3	1,038	,304
MO1	,680	,499
MO2	4,299	,000
MO3	,982	,330

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan data koefisien regresi yang diberikan dan rumus model Moderated Regression Analysis (MRA):

$$Y = a + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + B4 X1 Z + B5 X2 Z + B6 X3 Z + e$$

dengan:

$$a = 157,671 \quad a = 157,671 \text{ (konstanta)}$$

$$B1 = 0,864 \quad B1 = 0,864 \text{ (koefisien X1.2)}$$

$$B2 = 2,406 \quad B2 = 2,406 \text{ (koefisien X2.2)}$$

$$B3 = 1,038 \quad B3 = 1,038 \text{ (koefisien X3.3)}$$

$$B4 = 0,680 \quad B4 = 0,680 \text{ (koefisien MO1, interaksi X1 dengan Z)}$$

$$B5 = 4,299 \quad B5 = 4,299 \text{ (koefisien MO2, interaksi X2 dengan Z)}$$

$B6 = 0,982$ $B6 = 0,982$ (koefisien MO3, interaksi X3 dengan Z)

Berikut persamaan regresi berdasarkan output:

$$Y = 157,671 + 0,864X_1 + 2,406X_2 + 1,038X_3 + 0,680(X_1 \cdot Z) + 4,299(X_2 \cdot Z) + 0,982(X_3 \cdot Z) + e$$

Dari hasil persamaan regresi diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Intercept (*Constant*) = 157,671. Artinya, jika semua variabel independen dan moderasi bernilai nol, maka nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa secara teoritis adalah sebesar 157,671.
- b) $X_1 = 0,864$, $\text{sig} = 0,392 > 0,05$. Tidak berpengaruh signifikan
- c) $X_2 = 2,406$, $\text{sig} = 0,019 < 0,05$. Berpengaruh positif signifikan
- d) $X_3 = 1,038$, $\text{sig} = 0,304 > 0,05$. Tidak berpengaruh signifikan
- e) $\text{MO1} = 0,680$, $\text{sig} = 0,499 > 0,05$. Tingkat pendidikan tidak memperkuat pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas dalam model ini.
- f) $\text{MO2} = 4,299$, $\text{sig} = 0,000 < 0,05$. Tingkat pendidikan secara signifikan memoderasi pengaruh pemanfaatan TI terhadap akuntabilitas, dengan pengaruh tambahan sebesar 4,299. Ini berarti efek positif TI terhadap akuntabilitas menjadi lebih kuat jika pendidikan aparatur lebih tinggi.
- g) $\text{MO3} = 0,982$, $\text{sig} = 0,330$). Tingkat pendidikan tidak memperkuat pengaruh SPI terhadap akuntabilitas secara statistik dalam model ini.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk menggambarkan sejauhmana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 12
Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,587 ^a	,344	,311	1,187

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukan R square sebesar 0,311 atau setara dengan 31,1%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi perangkat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh sebesar 31,1% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan sisanya sebesar 68,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

G. Pembahasan

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel Coefficients, variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) memiliki nilai thitung sebesar 2,341 dan nilai signifikansi sebesar 0,023. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,023 < 0,05$) serta nilai thitung lebih besar dari ttabel ($2,341 > 1,671$), sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini memperkuat bahwa kualitas sumber daya manusia di tingkat desa merupakan

kunci dalam mendorong tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Secara lebih mendalam, hasil ini didukung oleh tanggapan responden pada kuesioner yang menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa telah mengikuti pelatihan teknis terkait pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman melalui pengembangan kapasitas formal, yang memperkuat aspek kognitif dalam kompetensi kerja. Pengetahuan tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam keahlian teknis, seperti kemampuan mengoperasikan komputer, khususnya aplikasi Microsoft Excel, serta kemampuan dalam melakukan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kedua indikator ini mencerminkan bahwa aparatur tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang mendukung proses pencatatan dan pelaporan dana desa secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain aspek teknis, hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki kemampuan memecahkan masalah yang baik. Hal ini tercermin dari pernyataan responden yang merasa mampu menemukan solusi terhadap kendala yang mereka hadapi dalam pekerjaan. Kemampuan ini sangat penting dalam konteks pengelolaan dana desa, karena permasalahan administratif maupun sosial sering kali muncul dalam praktik, dan membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tepat agar tidak mengganggu akuntabilitas penggunaan anggaran.

Lebih jauh lagi, sikap aparatur desa juga menjadi bagian dari kompetensi yang berkontribusi terhadap akuntabilitas. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka melayani masyarakat dengan sopan dan ramah, mencerminkan adanya komitmen etis dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Sikap ini berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana

desa, karena akuntabilitas tidak hanya dinilai dari sisi teknis, tetapi juga dari integritas dan tanggung jawab moral penyelenggara pemerintahan desa.

Tak kalah penting, kompetensi juga ditunjukkan melalui inisiatif dalam bekerja, di mana banyak aparatur desa mengaku memiliki inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa harus menunggu perintah. Inisiatif ini merupakan indikator penting dari profesionalisme, karena menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab individu dalam menyelesaikan tugas dengan proaktif, yang pada akhirnya mendukung keberlangsungan sistem administrasi keuangan desa secara efektif.

Dengan demikian, berdasarkan hasil statistik dan didukung oleh bukti empiris dari kuesioner, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa secara nyata memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kombinasi dari pengetahuan teknis, kemampuan operasional, sikap profesional, dan inisiatif kerja merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola dana desa yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pemanfaatan teknologi informasi menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 menunjukkan bahwasannya uji hipotesis ke dua diterima. Dengan demikian, dapat mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Djoko Wibowo, 2022)

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui berbagai mekanisme. Implementasi sistem informasi keuangan desa (SIKKD) atau aplikasi serupa dapat menciptakan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran dan transaksi keuangan. Setiap

penerimaan dan pengeluaran dana dapat tercatat secara digital dan diakses oleh pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat. Dengan demikian, potensi penyimpangan atau praktik korupsi dapat diminimalisir karena adanya jejak digital yang mudah diawasi (Djoko Wibowo, 2022). Hal ini sejalan dengan teori akuntabilitas yang menekankan pada keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya publik yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut, TI memfasilitasi pelaporan yang lebih cepat dan akurat. Proses penyusunan laporan keuangan desa yang sebelumnya mungkin dilakukan secara manual dan rentan kesalahan, dapat diotomatisasi dengan adanya sistem informasi. Laporan yang dihasilkan menjadi lebih terstandarisasi, mudah dipahami, dan dapat diakses secara *real-time* oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Pahlawan et al., 2020). Kemudahan dalam pelaporan ini mendukung prinsip akuntabilitas formal, di mana pertanggungjawaban pengelolaan dana harus didokumentasikan dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, pemanfaatan TI dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat. Informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa yang diunggah melalui website desa atau aplikasi khusus memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana secara lebih efektif. Masyarakat dapat memberikan umpan balik, mengajukan pertanyaan, atau melaporkan potensi penyimpangan secara lebih mudah (Saputra et al., 2024). Mekanisme partisipasi digital ini memperkuat akuntabilitas publik, di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam mengawasi penggunaan dana yang bersumber dari mereka.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Variabel sistem pengendalian internal pada hasil uji statistik hipotesis ke 3 mempunyai nilai signifikan sebesar 0,370 yang artinya lebih dari 0,05. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pahlawan et al., 2020)

Meskipun sistem pengendalian internal (SPI) dianggap sebagai fondasi tata kelola yang baik, implementasinya di tingkat desa seringkali menghadapi tantangan yang menyebabkan pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak signifikan. Salah satu alasannya adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparatur desa. Pengembangan dan implementasi SPI yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip pengendalian, penyusunan prosedur yang jelas, dan pemantauan yang berkelanjutan (Polutu et al., 2022). Banyak aparatur desa mungkin tidak memiliki pelatihan atau keahlian yang memadai untuk merancang dan menjalankan SPI yang komprehensif. Akibatnya, SPI yang ada mungkin bersifat formalitas tanpa implementasi yang substansial, sehingga tidak mampu mencegah atau mendeteksi penyimpangan secara efektif.

Selain itu, lemahnya penegakan aturan dan pengawasan eksternal juga menjadi faktor penghambat signifikan. Meskipun SPI yang baik telah dirancang, tanpa adanya pengawasan yang ketat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, maupun inspektorat daerah, potensi pelanggaran tetap tinggi. Sanksi yang tidak tegas terhadap penyimpangan dana desa juga melemahkan insentif bagi aparatur desa untuk patuh terhadap SPI. Dalam konteks ini, teori keagenan (*agency theory*) kembali relevan. Aparatur desa (agen) mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan

kepentingan masyarakat (prinsipal) jika tidak ada mekanisme pengawasan dan sanksi yang kredibel untuk mengendalikan perilaku mereka (Ridwan et al., 2023). SPI yang tidak didukung oleh pengawasan eksternal yang kuat menjadi kurang efektif dalam memastikan akuntabilitas. Selanjutnya, faktor budaya dan sosial di tingkat desa dapat memainkan peran yang signifikan dalam melemahkan efektivitas SPI. Norma-norma kolektivisme yang kuat atau hubungan kekeluargaan yang erat terkadang dapat menghambat objektivitas dalam pelaksanaan pengendalian. Praktik nepotisme atau favoritisme dapat mengabaikan prosedur pengendalian yang seharusnya diterapkan. Selain itu, budaya pelaporan yang kurang transparan atau keengganan untuk mengkritisi rekan kerja juga dapat menghambat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.

4. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dimoderasi oleh Tingkat Pendidikan

Hasil uji hipotesis, yang melibatkan tingkat pendidikan sebagai pemoderasi hubungan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Yang dapat dilihat dari hasil regresi yang dilakukan, nilai Sig untuk moderasi antara kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa mendapatkan hasil 0,499 berarti lebih dari 0,05. Hasil yang didapatkan sejalan dengan penelitian (Ummah, 2025)

Peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pendidikan formal diharapkan berkorelasi positif dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, interaksi antara kompetensi dan tingkat pendidikan sebagai pemoderasi tidak selalu menghasilkan peningkatan akuntabilitas yang signifikan (Saputra et al., 2024). Salah satu alasannya adalah disparitas antara pendidikan formal dan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa. Pendidikan formal

mungkin memberikan pengetahuan teoritis, namun belum tentu membekali aparatur desa dengan keterampilan teknis yang spesifik dalam perencanaan anggaran desa, pengelolaan keuangan, pelaporan, dan pengawasan. Jika kompetensi yang diperoleh dari pendidikan tidak relevan dengan tugas-tugas pengelolaan dana desa, maka peningkatan tingkat pendidikan tidak secara otomatis meningkatkan akuntabilitas. Hal ini berkaitan dengan teori human capital, yang menekankan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas jika keterampilan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Dalam konteks ini, pendidikan yang tidak spesifik pada pengelolaan keuangan desa mungkin tidak berkontribusi signifikan terhadap akuntabilitas.

Lebih lanjut, faktor motivasi dan integritas individu dapat menjadi penghalang signifikan meskipun aparatur desa memiliki kompetensi yang tinggi dan tingkat pendidikan yang memadai. Seseorang dengan pendidikan tinggi dan kompetensi yang mumpuni tetap berpotensi melakukan praktik pengelolaan dana yang tidak akuntabel jika tidak memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku. Tingkat pendidikan formal tidak secara otomatis menjamin integritas atau komitmen terhadap akuntabilitas publik. Dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*), meskipun agen (aparatur desa) memiliki kemampuan (kompetensi dan pendidikan), mereka mungkin tetap bertindak untuk kepentingan pribadi jika tidak ada insentif yang tepat dan pengawasan yang efektif. Tingkat pendidikan sebagai pemoderasi kompetensi menjadi kurang relevan jika faktor motivasi dan integritas tidak mendukung perilaku akuntabel.

Selain itu, konteks kelembagaan dan tata kelola di tingkat desa memiliki peran yang krusial dalam memengaruhi hubungan antara kompetensi, pendidikan, dan akuntabilitas. Sistem pengawasan yang lemah, kurangnya transparansi, dan

rendahnya partisipasi masyarakat dapat menumpulkan dampak positif dari kompetensi aparatur desa, meskipun dimoderasi oleh tingkat pendidikan yang tinggi (Taufik & Nasir, 2020). Lingkungan kerja yang permisif terhadap praktik korupsi atau tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif dapat menyebabkan aparatur desa, terlepas dari tingkat pendidikan dan kompetensinya, tidak terdorong untuk bertindak secara akuntabel. Hal ini sejalan dengan teori institusional, yang menyatakan bahwa perilaku organisasi dan individu dipengaruhi oleh norma, aturan, dan praktik yang berlaku dalam lingkungan kelembagaan tempat mereka beroperasi. Jika institusi di tingkat desa tidak mendukung akuntabilitas, maka peningkatan kompetensi melalui pendidikan tidak akan secara otomatis menghasilkan pengelolaan dana yang lebih baik.

5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dimoderasi oleh Tingkat Pendidikan

Sebuah uji hipotesis dilakukan untuk memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasilnya menunjukkan nilai signifikansi sejumlah $0,000 < 0.05$. Kesimpulannya adalah tingkat pendidikan dapat memoderasi keterkaitan tersebut. tingkat pendidikan dapat menjelaskan dampak tingkat pendidikan, jadi H_5 diterima dan H_0 ditolak. Penelitian sebelumnya oleh (Nursin et al., 2022) menemukan bahwa tingkat pendidikan dapat memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tingkat pendidikan aparatur desa berperan sebagai moderator penting dalam hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena memengaruhi kemampuan aparatur dalam mengadopsi, mengoperasikan, dan memanfaatkan TI secara

efektif (Pribadi et al., 2025). Aparatur dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan kognitif dan analitis yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk lebih cepat memahami dan menguasai sistem informasi keuangan desa (SIKKD) atau aplikasi serupa. Mereka juga lebih mampu dalam menginterpretasikan data yang dihasilkan oleh sistem TI untuk tujuan pelaporan dan pertanggungjawaban yang akurat. Dengan demikian, investasi dalam TI akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap akuntabilitas jika didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas intelektual yang memadai untuk memanfaatkannya.

Selanjutnya, tingkat pendidikan seringkali berkorelasi dengan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik dan akuntabilitas publik. Aparatur desa yang lebih terdidik cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik. Ketika TI diimplementasikan, aparatur dengan pemahaman yang baik ini akan lebih termotivasi dan mampu menggunakan fitur-fitur TI untuk meningkatkan transparansi (misalnya, melalui publikasi *online*), memfasilitasi partisipasi (misalnya, melalui platform daring untuk konsultasi), dan menghasilkan laporan yang akuntabel.

Dalam konteks teori agensi (*agency theory*), tingkat pendidikan aparatur desa dapat memengaruhi potensi terjadinya *agency problem*. *Agency problem* muncul ketika kepentingan agen (aparatur desa) tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan prinsipal (masyarakat dan pemerintah). Aparatur yang lebih terdidik cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab fidusia mereka sebagai agen dan potensi konsekuensi dari tindakan yang tidak akuntabel. Pemanfaatan TI, ketika dikelola oleh aparatur yang kompeten dan memiliki pemahaman yang baik tentang

akuntabilitas (yang seringkali dipengaruhi oleh tingkat pendidikan) (Nursin et al., 2022), dapat menjadi mekanisme pengawasan internal yang lebih efektif, mengurangi peluang bagi agen untuk bertindak oportunistik.

6. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dimoderasi oleh Tingkat Pendidikan

Hasil uji hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan dapat memoderasi keterkaitan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa menghasilkan nilai signifikan sejumlah 0,330 atau lebih besar dari 0,05. Menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak mampu memoderasi kaitan tersebut. Oleh karena itu H_6 ditolak dan H_0 diterima. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Walyati, 2020) yang mendapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan tidak dapat memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Meskipun tingkat pendidikan sering dianggap sebagai indikator kapasitas individu, dalam konteks moderasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, tingkat pendidikan aparatur desa tidak selalu menunjukkan efek moderasi yang signifikan. Salah satu alasannya adalah bahwa kepatuhan terhadap SPI lebih dipengaruhi oleh kesadaran hukum, budaya organisasi, dan pengawasan yang efektif daripada sekadar tingkat pendidikan formal (Ummah, 2025). Aparatur desa dengan tingkat pendidikan tinggi pun dapat mengabaikan atau tidak efektif dalam menerapkan SPI jika tidak ada penegakan aturan yang kuat, budaya organisasi yang mendukung kepatuhan, dan pengawasan yang memadai dari pihak berwenang serta masyarakat. Dalam hal ini, efektivitas SPI lebih ditentukan oleh faktor-faktor eksternal dan internal organisasi daripada atribut individu seperti tingkat pendidikan.

Lebih lanjut, desain dan implementasi SPI yang buruk dapat meniadakan potensi efek moderasi dari tingkat pendidikan. Jika SPI yang ada tidak relevan dengan konteks pengelolaan dana desa, terlalu rumit, atau tidak dipahami dengan baik oleh aparatur desa, maka tingkat pendidikan formal yang tinggi tidak akan secara otomatis menjamin implementasi yang efektif (Ridwan et al., 2023). Pendidikan memang dapat meningkatkan pemahaman teoritis tentang pentingnya pengendalian, namun jika sistem itu sendiri cacat atau tidak praktis, aparatur dengan pendidikan tinggi pun akan kesulitan menerapkannya dengan benar. Fokus seharusnya lebih pada kualitas dan relevansi SPI itu sendiri, serta pelatihan praktis yang memadai bagi seluruh aparatur desa, terlepas dari tingkat pendidikan formal mereka.

Dalam kerangka teori keagenan (*agency theory*), SPI merupakan mekanisme yang dirancang untuk memitigasi risiko *agency problem* dengan memastikan bahwa tindakan agen (aparatur desa) selaras dengan kepentingan prinsipal (masyarakat dan pemerintah). Tingkat pendidikan aparatur desa, meskipun dapat berkontribusi pada pemahaman tentang pentingnya pengendalian, tidak secara langsung mengubah insentif atau risiko yang dihadapi agen (Budiati et al., 2020). Efektivitas SPI dalam mengurangi perilaku oportunistik lebih bergantung pada desain sistem yang mampu mendeteksi dan mencegah penyimpangan, serta adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang kredibel. Aparatur dengan pendidikan tinggi pun dapat tergoda untuk bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal jika SPI lemah dan pengawasan tidak efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, yang mencakup kemampuan teknis, kognitif, sikap profesional, dan inisiatif kerja, memiliki kontribusi nyata dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Aparatur desa yang kompeten mampu menyusun laporan keuangan dengan baik, menyelesaikan masalah secara mandiri, serta menunjukkan integritas dan pelayanan publik yang bertanggung jawab.
2. Pemanfaatan teknologi informasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Penggunaan sistem informasi keuangan desa dan teknologi digital lainnya terbukti dapat meningkatkan transparansi, efisiensi pelaporan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Teknologi ini menjadi alat penting dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
3. Sistem pengendalian internal (SPI) yang ada saat ini belum berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Banyak desa menjalankan SPI hanya sebagai formalitas administratif tanpa pemahaman substansial atas fungsi dan manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas aparatur, kurangnya pendampingan dari lembaga pengawas, serta tidak adanya kebiasaan evaluatif dalam budaya organisasi pemerintahan desa. Akibatnya, meskipun SPI tercantum dalam dokumen, pelaksanaannya tidak optimal.
4. Tingkat Pendidikan tidak memoderasi hubungan antara Kompetensi Aparatur Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan

Dana

Desa.

Pendidikan formal tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan praktis yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa. Ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan realitas kerja, serta rendahnya integritas dan motivasi personal, membuat pendidikan tidak memperkuat efek kompetensi terhadap akuntabilitas.

5. Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas. Semakin tinggi pendidikan aparatur desa, semakin besar kemampuannya untuk mengoperasikan perangkat digital, memahami sistem aplikasi keuangan desa, dan menggunakan teknologi untuk pelaporan yang lebih transparan. Pendidikan formal di sini berperan sebagai pengungkit terhadap efektivitas pemanfaatan teknologi.
6. Tingkat Pendidikan tidak memoderasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
Efektivitas SPI lebih dipengaruhi oleh desain sistem, kualitas pengawasan, dan budaya organisasi dibandingkan tingkat pendidikan formal aparatur. Sistem pengendalian yang lemah tetap tidak efektif meskipun dijalankan oleh aparatur berpendidikan tinggi.

B. Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya fokus pada variabel kompetensi aparatur, teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal. Ada banyak faktor lain yang kemungkinan besar juga ikut memengaruhi akuntabilitas dana desa, seperti partisipasi masyarakat, keterbukaan anggaran, integritas pejabat desa, atau budaya organisasi.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan pendekatan kuantitatif seperti wawancara langsung atau studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.
3. penelitian selanjutnya sebaiknya mencakup area yang lebih luas dan responden yang lebih banyak. Semakin luas cakupannya,

semakin besar peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif dan bisa dibandingkan antar wilayah.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kecamatan Ketanggungan, sehingga temuan-temuan yang diperoleh belum tentu berlaku di wilayah lain yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, atau budaya yang berbeda. Hasilnya mungkin akan berbeda jika penelitian dilakukan di desa dengan karakteristik yang tidak sama.
2. Seluruh data dikumpulkan melalui kuesioner yang bersifat self-report (diisi sendiri oleh responden), sehingga sangat bergantung pada kejujuran, pemahaman, dan persepsi masing-masing aparatur desa. Kondisi ini memungkinkan adanya bias jawaban, terutama jika responden merasa tidak nyaman memberikan informasi yang sensitif atau merasa tidak paham dengan beberapa pertanyaan teknis.
3. Penelitian ini hanya fokus pada beberapa faktor saja, yaitu kompetensi aparatur, teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi. Padahal dalam kenyataannya, akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa dipengaruhi oleh banyak hal lain seperti gaya kepemimpinan, keterlibatan masyarakat, transparansi, dan lain sebagainya. Jadi, hasil penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan keseluruhan faktor yang berperan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alauddin, F. C. (2020). *PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)* SKRIPSI.
- Ambarwati, L., Widya, S., Yogyakarta, W., Nur, U., Handayani, N., & Akuntansi, J. (N.D.). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Studi Kasus Kelurahan Margokaton Kabupaten Sleman Yogyakarta). In *Seminar Nasional STIE Wiya Wiwaha*. www.Slemankab.Go.Id
- Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2020). Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(4), 425–444. <https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2019.V3.I4.4127>
- Polutu, A., Mattoasi, M., & Usman, U. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 89–101. <https://doi.org/10.37905/Jar.V3i2.53>
- Pribadi, K. I., Eko, S., Santoso, B., Dirgantari, N., & Ilma, A. (2025). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN Pengaruh Komitmen Organisasi , Transparansi , Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Varibel Moderasi*. 13(1), 39–52.
- Walyati, F. N. (2020). *PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI DAN SISTEM PENGENADLIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan)* SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pa.

- Ummah, M. S. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI](http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Polutu, A., Mattoasi, M., & Usman, U. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 89–101. <https://doi.org/10.37905/Jar.V3i2.53>
- Pribadi, K. I., Eko, S., Santoso, B., Dirgantari, N., & Ilma, A. (2025). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN Pengaruh Komitmen Organisasi , Transparansi , Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Varibel Moderasi*. 13(1), 39–52.
- Sujatnika, I. N. J., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Pengaruh Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2), 378–388.
- Taufik, T., & Nasir, A. (2020). The Influence Of Village Aparature Competence, Internal Control System And Whistleblowing System On Fraud Prevention In Village Government With Individual Morality As Moderated Variables (Study In Villages In Bengkalis District). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237. [Http://Www.Ejournal.Pelitaindonesia.Ac.Id/Ojs32/Index.Php/BILAN_CIA/Index](http://Www.Ejournal.Pelitaindonesia.Ac.Id/Ojs32/Index.Php/BILAN_CIA/Index)

- Saputra, Y., Sekar Sari, M., & Warisi, D. (2024). Pengaruh Transparansi Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *Gedong Meneng*, 7, 35145. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id>
- Sugiyono, P. D. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Setiawami (Ed.); 4th Ed.). Alfabeta.
- Ando, R., Soleman, R., & Sinen, K. (2024). *The Influence Of Village Apparatus Competence, Community Participation, Organizational Commitment, Implementation Of Village Financial Information Systems On Village Fund Management Accountability*. 5, 598.
- Anjaliati, L., Diana, N., & Mawardi Cholid. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan Terhadap Akuntabilitas Penyusunan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Desa Kramat, Desa Kambu, Desa Malaju, Desa Lasi Kec. Kilo Kab. Dompu). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(01).
- Aprilya, K. R. (2020). PENGARUH KOMPETENSI, KOMITMEN ORGANISASI, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3).
- Fajri, R., Agusti, R., & Julita. (2021). PENGARUH TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI APARATUR DESA, DAN PEMAHAMAN REGULASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 214.
- Febrianti, T., & Yuhertiana, I. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS*, 14(1), 137–146. [Http://Journal.Stekom.Ac.Id/Index.Php/E-Bisnis](http://Journal.Stekom.Ac.Id/Index.Php/E-Bisnis)■Page137
- Hardyansyah. (N.D.). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM*

PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA SKPD KABUPATEN POLEWALI MANDAR) SKRIPSI.

- Husain, S. P., Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review Journal Homepage*, 4(1), 66–76.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 5.
- Izzy, T. A. (2019). *KARAKTERISTIK DESA, KARAKTERISTIK KEPALA DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENYERAPAN DANA DESA SKRIPSI.*
- Maharani, G. (2021b). *PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang) SKRIPSI.*
- Meriana, B. (2022). PENGARUH AKSESIBILITAS INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PELATIHAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PERAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). *SI Thesis*.
- Mualifu, A., & Guspul, H. (2019). PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERNITAH DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (STUDI EMPIRIS PADA SELURUH DESA DI KECAMATAN

- MREBET KABUPATEN PURBALINGGA). In *Journal Of Economic, Business And Engineering* (Vol. 1, Issue 1).
- Nur, M., Sawitri, A., & Prastiti, D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. In *Jurnal Akuntansi Aktual* (Vol. 6, Issue 2).
- Nurkhasanah, I. (2019). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI PENGANGGARAN, PENGAWASAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Pringsurat) SKRIPSI*.
- Nursin, D., Syamsuddin, S., & Nirwana, N. (2022). Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 77–101. <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i1.1359>
- Putu Intandika Purbasari, & Gede Adi Yuniarta. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jembrana. *JURNAL AKUNTANSI PROFESI*, 11(1).
- Rahmaindah, S. (2022). *PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA DI KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES) SKRIPSI*.
- Rezeki, E. S. (2019). *PERAN TINGKAT PENDIDIKAN DALAM MEMODERASI PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, KOMITMEN ORGANISASI, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN TAMBAKROMO*.

- Ridwan, M., Santosa, R. E., Suharto, S., & Putri, A. (2023). PERAN MODERASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA HUBUNGAN KOMPETENSI PENGELOLA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Equilibrium*, 12(1), 92–101.
- Riyadi, W., & Kurniadi, E. (2020). Influence Of Information Technology Utilization, Budgeting Participation And Supervision On Accountability Of Village Fund Management In Sindang District Of Majalengka Regency. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* [Http://Jurnal.Unma.Ac.Id/Index.Php/Mr/Index](http://Jurnal.Unma.Ac.Id/Index.Php/Mr/Index), 3(2). [Http://Jurnal.Unma.Ac.Id/Index.Php/Mr/Index](http://Jurnal.Unma.Ac.Id/Index.Php/Mr/Index)
- Rizka, A. S., & Gowon, M. (2021). *THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES COMPETENCY AND INTERNAL CONTROL SYSTEM ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS WITH THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS THAT ARE SUCCESSFUL AS INTERVENTION VARIABLES (EMPIRICAL STUDY ON LOCAL GOVERNMENT OF JAMBI CITY) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI) Oleh* (Vol. 6, Issue 3). [Https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Jaku](https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Jaku)
- Sarah, S., Taufik, T., Safitri, D., Batang Cenaku, K., Batang Gansal, K., Kuala Cenaku, K., & Rengat Barat, K. (2020). THE EFFECT OF APARATUR COMPETENCY, ORGANIZATIONAL COMMITMENT, UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY, COMMUNITY PARTICIPATION AND INTERNAL CONTROL SYSTEM OF THE ACCOUNTABILITY OF VILLAGE MANAGEMENT IN KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4). [Http://Www.Ejournal.Pelitaindonesia.Ac.Id/Ojs32/Index.Php/BILANCIA/Index](http://Www.Ejournal.Pelitaindonesia.Ac.Id/Ojs32/Index.Php/BILANCIA/Index)

Sari, P. R. (2022). *DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA*. FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA.

Sutrepti, N. L. P., Sumadi, N. K., & Muliati, N. K. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sekecamatan Petang. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 33.

Wibowo Djoko. (2022). *ANALISIS PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPIN)*.



Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : **Melvina Anggika Tama**
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 01 September 2002
3. Alamat : Desa Kubangjati, Kecamatan
Ketanggungan, Kabupaten Brebes,
Jawa Tengah
4. No HP : 087700382581
5. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Jurusan : Akuntansi Syariah
7. Nama Orang Tua : Sobirin Arifin dan Lilis Maria

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Kubangjati 02
2. SMP Negeri 1 Ketanggungan
3. SMA Negeri 1 Banjarharjo
4. Tercatat sebagai mahasiswa Strata (S1) Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Melvina Anggika Tama
NIM : 4321034
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
E-mail address : anggika167@gmail.com
No. Hp : 087700382581

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN TINGKAT
PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KECAMATAN
KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES.**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 14 Juni 2025



MELVINA ANGGIKA TAMA
4321034

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani Kemudian diformat pdf
dan dimasukkan dalam Flashdisk